

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN MERITOKRATIS DALAM MASYARAKAT JEPANG MODERN

2.1 Sistem Pendidikan Jepang Modern

Dalam membahas berbagai situasi dalam proses modernisasi, masyarakat Jepang sering digunakan istilah *senzen* dan *senjo* dan menjadikan Perang Dunia II pada tahun 1945 sebagai patokan utama. *Senzen* (戦前) merujuk pada masa sebelum perang, yakni masa sejak Restorasi Meiji tahun 1868 hingga Perang Dunia II, sedangkan *senjo* (戦後) sebagai kurun waktu sesudah perang tersebut. Dalam mengupayakan terjadinya modernisasi dalam segala aspek kehidupan, pendidikan memegang peranan penting dalam membekali masyarakat Jepang. Pada masa *senzen*, semboyan Jepang adalah *fukokukyohei* (富国強兵) yang bermakna "negara kaya, militer kuat" sehingga militer memegang peranan penting dalam pendidikan Jepang. Pada masa *senjo*, orientasi Jepang adalah untuk

mengejar *kōdokeizaiseichō* (高度経済成長) yang mengacu pada perkembangan ekonomi yang pesat, sehingga bentuk pendidikan juga turut menyesuaikan¹³.

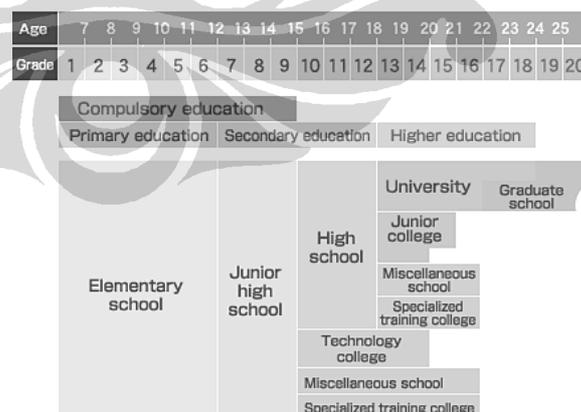
Sistem pendidikan modern Jepang yang telah ada sejak zaman Meiji (1868—1912) mengalami pembentukan yang tetap pada tahun 1947, yakni se usai Perang Dunia II. Sesuai dengan prinsip birokrasi yang telah diungkapkan Weber (Johnson: 1986), yakni adanya administrasi birokratis yang terdiri dari penerapan peraturan umum secara pasti terhadap pegawai-pegawai yang bekerja menurut kemampuan dan wewenang resminya, pemerintah Jepang membentuk *Mombukagakushō* (文部科学省) yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Teknologi, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Kementerian Pendidikan Jepang. Kementerian ini membentuk sebuah sistem pendidikan formal yang tetap dengan mengadaptasi model pendidikan Amerika. Sistem pendidikan formal¹⁴ tersebut berbentuk 6-3-3-4, yakni 6 tahun masa studi untuk jenjang *shōgakkō* (小学校) atau Sekolah Dasar, 3 tahun untuk *chūgakkō* (中学校) atau Sekolah Menengah Pertama, 3 tahun untuk *kōtōgakkō* (高等学校) atau Sekolah Menengah Atas—biasa disingkat dengan *kōkō* (高校), dan 4 tahun untuk *daigaku* (大学) atau universitas. Sebagai tambahan, terdapat pula *yōchien* (幼稚園) atau Taman Kanak-kanak, juga masa studi 5 tahun pada *senmongakkō* (専門学校) atau Sekolah Kejuruan untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama, dan juga Sekolah Luar Biasa untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kementerian Pendidikan Jepang membawahi secara langsung sekolah-sekolah negeri, dan juga

¹³ Terawaki Ken, *Saraba Yutori Kyouiku*, (Tōkyo: Kobunsha, 2008) hlm 85.

¹⁴ Pendidikan formal adalah program pendidikan yang terencana dan memiliki sertifikasi yang bertujuan melatih dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, pikiran, dan karakter siswa.

memiliki wewenang terbatas atas sekolah swasta yang dikelola secara pribadi oleh pihak non-pemerintah. Kementerian juga memiliki wewenang untuk mengatur kurikulum dan menyeleksi buku teks yang digunakan dalam proses belajar-mengajar di seluruh sekolah Jepang, juga untuk mengubah atau merevisi isi pendidikan sehingga selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kementerian Pendidikan Jepang mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar selama 9 tahun berupa 6 tahun pendidikan Sekolah Dasar dan 3 tahun pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Tingkat *enrollment* siswa tergolong tinggi selama jenjang pendidikan wajib ini, yakni lebih dari 90% untuk tingkat SD dan SMP. Setelah menyelesaikan pendidikan wajibnya, sebagian besar siswa tetap meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya, dan hanya 4% dari total jumlah siswa lulusan SMP yang tidak meneruskan ke tingkat SMA. Berikut tertera bagan jenjang pendidikan Jepang yang disesuaikan dengan usia siswa dan tingkatan kelasnya.



Gambar 3.1 Bagan jenjang pendidikan sekolah Jepang

Sumber: International Communication Committee (2006)

2.2 Meritokrasi dalam Sistem Pendidikan Jepang Modern

Seperti telah diungkapkan, pada kurun waktu sesudah Perang Dunia II, pendidikan di sekolah Jepang ditujukan untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai negara dalam waktu sesingkat mungkin. Pendidikan dirancang untuk mempersiapkan generasi muda agar memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menunjang sektor ekonomi Jepang, khususnya industri. Dengan demikian, proses belajar di sekolah ditingkatkan dengan materi pelajaran yang padat dan sistem penilaian melalui ujian yang ketat. Begitu pentingnya ujian bagi seorang siswa, banyak yang mengikuti *juku* (塾) atau les tambahan di luar jam sekolah untuk memantapkan materi yang telah dipelajari di sekolah.

Penekanan mengenai pentingnya pendidikan telah ditanamkan sedari kecil, sehingga seorang anak mengerti bahwa yang menentukan sukses di masa depan adalah dirinya sendiri dengan cara berprestasi sebaik mungkin. Jepang dikatakan sebagai *gakurekishakai* (学歴社会), yakni sebuah masyarakat yang didasarkan pada latar belakang pendidikan. Mampu masuk ke SMA yang baik dapat menjadi jaminan untuk masuk ke universitas yang baik dan ternama, sehingga selanjutnya akan memuluskan jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pada perusahaan yang ternama pula.

Seperti telah dicantumkan dalam Konstitusi Jepang setelah Perang Dunia II, pemerintah menjamin setiap siswa “memperoleh hak yang sama untuk menerima pendidikan sehubungan dengan kemampuan mereka” (pasal 26).

Selanjutnya, dalam Hukum Dasar Pendidikan Jepang diungkapkan bahwa “masyarakat akan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka” (pasal 3). Dengan demikian, melalui kedua prinsip dasar pendidikan di atas pemerintah menjamin adanya kesetaraan bagi seluruh rakyat Jepang untuk memperoleh pendidikan yang sama. Melalui hal ini maka terdapat apa yang dinamakan *kakuitsubyōdō* (画一平等) atau standardisasi pendidikan. Standardisasi di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk menikmati pendidikan, laki-laki maupun perempuan, pada usia yang sama, menerima pelajaran yang sama dengan jumlah waktu yang sama, sehingga semua siswa memiliki kemampuan yang sama tinggi untuk berkontribusi penuh dalam usaha memajukan bangsa, khususnya perekonomian.

Melalui jaminan tersebut, maka pemerintah melarang adanya diskriminasi baik dalam hal ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, atau asal-usul keluarga. Namun demikian, membedakan siswa berdasarkan kemampuan tidak dianggap sebagai diskriminasi. Hal ini sesuai dengan etos kerja bangsa Jepang yang menjunjung tinggi disiplin dan kerja keras, sehingga dipercaya bahwa semua siswa pada dasarnya memiliki kemampuan yang sama dan hasil pencapaian mereka hanya dibedakan oleh besarnya usaha mereka. Keadaan ini membawa pada keberhasilan pendidikan Jepang dalam membentuk sumber daya berkualitas sebagai pendukung utama peningkatan perekonomian negara.

Keadaan pendidikan Jepang yang telah digambarkan di atas sesuai dengan prinsip meritokrasi yang telah diungkapkan Parsons seperti dikutip dari buku *Sociology: Themes and Perspective*. Menurutnya, dalam sebuah masyarakat modern khususnya masyarakat industrialisasi terdapat sebuah pergeseran bentuk dari askriptif menuju prestasi. Askriptif menunjukkan keadaan bahwa status seseorang dilihat dari faktor keturunan yang ia peroleh sejak ia lahir, seperti jenis kelamin, kelas sosial orang tua, maupun etnisitas. Dalam sebuah sistem pendidikan, keadaan tersebut memunculkan ketidakadilan dalam kesempatan dalam mengakses pendidikan, karena hanya mereka yang terlahir dari keluarga dengan status sosial memadai yang mampu memperoleh pendidikan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat pada pendidikan zaman feodal Jepang yang hanya memberikan akses pendidikan pada anak-anak dari keluarga bangsawan atau samurai. Bertentangan dengan keadaan tersebut, sistem pendidikan modern menganut prinsip prestasi yang menunjukkan bahwa seseorang dilihat dari kemampuan atau hasil pencapaian yang ia peroleh dengan usahanya sendiri. Sistem pendidikan modern juga menjamin adanya kesamaan hak memperoleh pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Perubahan ke arah masyarakat yang dinilai berdasarkan kemampuan tersebut menunjukkan adanya meritokrasi¹⁵, yakni sebuah sistem sosial yang memberikan penghargaan dan posisi sosial kepada seseorang berdasarkan kemampuan dan prestasinya, bukan pada faktor askriptif seperti kelas sosial, etnisitas, maupun jenis kelamin.

¹⁵ *Sociology: Themes and Perspectives*, hlm 693.

2.3 *Gakushūshidōryō* dalam Sistem Pendidikan Jepang Modern

Sebagai upaya membangun kembali negeri akibat kekalahan pada Perang Dunia II dan memajukan perekonomian dengan pendidikan, pada tahun 1947 pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikan membentuk sistem pendidikan yang tetap untuk seluruh negeri. Sering waktu, sistem tersebut mengalami perubahan atau revisi sehingga konten pendidikan selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan perjalanan pendidikan modern Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Pada tahun 1951, *Gakushūshidōryō* (学習指導要領) atau Garis Besar Panduan Belajar pendidikan Jepang diperkenalkan. Panduan Belajar ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Jepang dan memuat penjelasan mengenai standar objektivitas dan isi tiap pelajaran. Tiap sekolah berhak untuk menentukan sendiri kurikulum yang akan digunakan, tentunya dengan tetap berpegang pada Panduan Belajar yang telah dikeluarkan pemerintah dan sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan siswa sekolah tersebut. Sebagai awalan, Garis Besar Panduan Belajar sekolah Jepang memuat landasan pendidikan yang menekankan pada sistem belajar berbasis pengalaman dan dibagi menjadi empat pendidikan utama yakni teknik (bahasa dan aritmatika), pelajaran untuk memupuk kreativitas (musik, menggambar, keterampilan rumah tangga), masyarakat dan lingkungan (ilmu sosial), dan kesehatan (olahraga).

Tahun 1958, Garis Besar Panduan Belajar diresmikan, dan landasan pendidikan yang semula berbasis pengalaman bergeser menjadi sistematis. Tujuan

pendidikan adalah untuk melatih siswa memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar yang memadai untuk menghadapi kehidupan dewasa. Pada kurun waktu ini, pelajaran yang diutamakan adalah bahasa dan aritmatika.

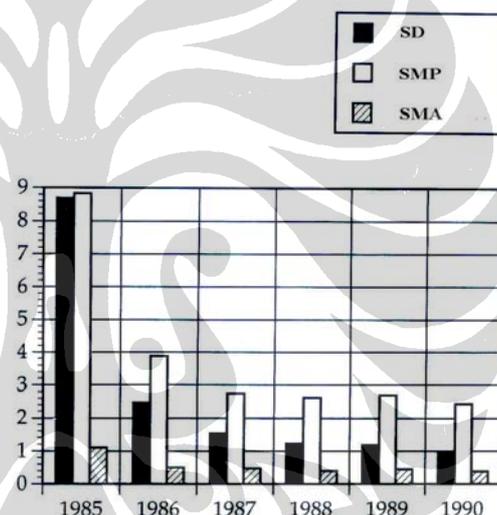
Tahun 1968, pemerintah merevisi Garis Besar Panduan Belajar untuk menyeimbangkan isi pendidikan. Pada tahun 1971, revisi tersebut diberlakukan dengan isi utama mempromosikan keseimbangan antara pelajaran utama, pendidikan moral, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Pada tahun 1976, Chūōkyōikushingikai (中央教育審議会) atau Komite Pusat Untuk Pendidikan yang dibawah Kementerian Pendidikan memperkenalkan konsep *yutori-jūjitsu* (ゆとり・充実). Dalam bahasa Indonesia, konsep ini kurang lebih berarti “leluasa dan sempurna”. Berlandaskan konsep tersebut, pada tahun 1977 pendidikan Jepang kembali mengalami revisi yang berakibat pada pemotongan jam pelajaran sekolah dan diberlakukan mulai tahun 1980. Kali ini, pemerintah mempromosikan pendidikan yang mendukung suasana belajar mengajar di sekolah lebih leluasa, santai, namun tetap memenuhi standar kurikulum. Tujuan pendidikan adalah untuk memupuk siswa agar memiliki keseimbangan antara ilmu, moral, kesehatan, sekaligus memiliki kekayaan sebagai seorang manusia.

Pada kurun waktu ini pula berbagai permasalahan siswa mulai menjadi perhatian masyarakat. Berbagai permasalahan siswa mulai terlihat dan menjadi perhatian masyarakat luas. Permasalahan tersebut seperti *ijime* (いじめ) yakni penindasan yang dilakukan seorang siswa terhadap temannya, *futōkō* (不登校)

yakni keengganan pergi ke sekolah, *gakkyūhōkai* (学級崩壊) yakni keonaran dalam kelas, *kōnai bōryoku* (校内暴力) yakni kekerasan dalam sekolah, hingga *jisatsu* (自殺) yang berarti bunuh diri.

Berikut merupakan bagan persentase berbagai tindak permasalahan siswa. Yang pertama adalah grafik jumlah kasus *ijime* siswa sekolah tingkat SD hingga SMA berdasarkan kurun waktu tahun 1985 hingga 1990.

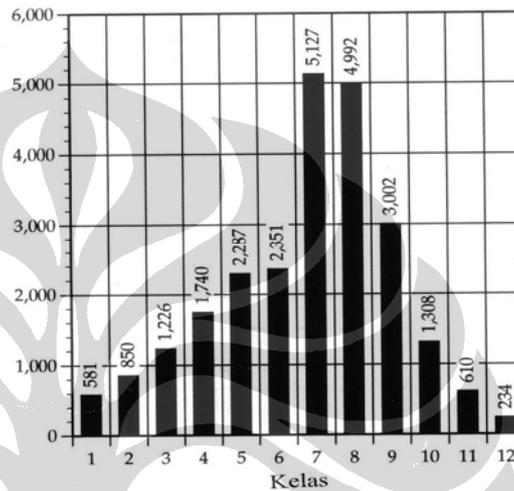


Gambar 3.2 Grafik jumlah kasus *ijime* siswa sekolah per 1000 siswa
Sumber: Mombushō Shōtō Chūtō Kyōikukyoku, 1992

Melalui grafik di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 1985 hingga 1990, tingkat kasus *ijime* pada tahun 1985 menunjukkan angka yang sangat tinggi, yakni 8,7 pada tingkat Sekolah Dasar dan 8,8 pada Sekolah Menengah Pertama. Hal ini menunjukkan bahwa di antara 1000 siswa, terdapat lebih dari 800 kasus penindasan seorang siswa oleh temannya, baik pada tingkat SD maupun SMP. Penindasan yang dimaksud dapat berupa kontak fisik maupun

mental, dan data ini tentunya belum termasuk kasus yang tidak diketahui atau dilaporkan.

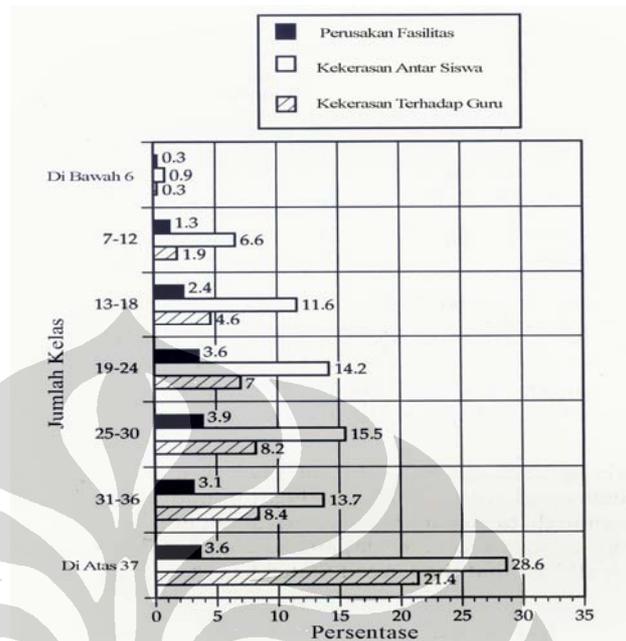
Berikut merupakan grafik kasus *ijime* berdasarkan tingkatan kelas.



Gambar 3.3 Grafik kasus *ijime* berdasarkan tingkatan kelas
 Sumber: Mombushō Shōtō Chūtō Kyōikukyoku, 1992

Sesuai dengan tingkatan kelas pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa kasus *ijime* paling banyak terjadi pada kelas 7 dan 8, atau kelas 1 dan 2 Sekolah Menengah Pertama. Terdapat sebanyak 5.127 kasus yang terjadi pada kelas 1 SMP dan 4.992 kasus pada kelas 2 SMP pada kurun waktu sekitar tahun 1992.

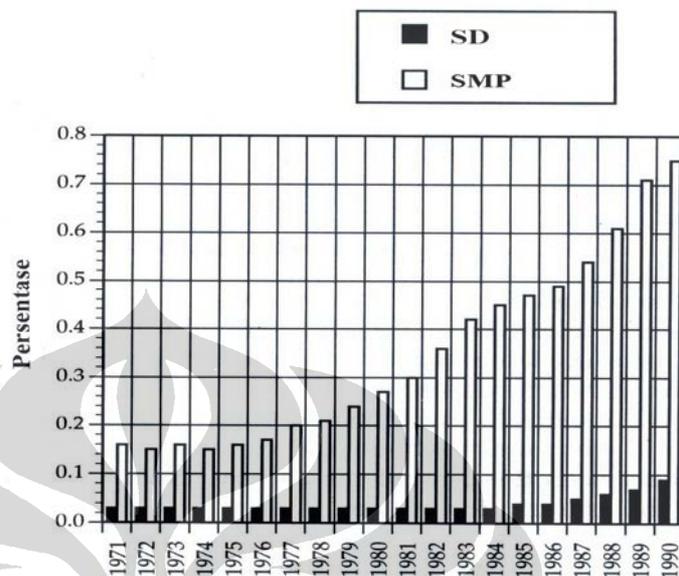
Berikut merupakan grafik persentase tindak kekerasan dalam sekolah yang dilakukan oleh siswa SMP.



Gambar 3.4 Grafik persentase tindak kekerasan dalam sekolah oleh siswa SMP
Sumber: Sōmucho, 1991, berdasarkan data Mombushō

Grafik di atas menunjukkan persentase tindak kekerasan berupa perusakan fasilitas, kekerasan antar siswa, dan kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh siswa SMP. Persentase tersebut sesuai dengan jumlah kelas yang terdapat pada suatu sekolah, sehingga semakin banyak kelas yang tersedia, semakin banyak kuota siswa, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadi tindak kekerasan dalam sekolah. Pada sekolah yang hanya menyediakan 6 kelas atau kurang, tindak kekerasan yang terjadi tidak sebanyak sekolah yang menyediakan hingga 37 kelas atau lebih. Dapat dilihat bahwa persentase rata-rata tindak kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan antar siswa, diikuti kekerasan terhadap guru, dan kemudian perusakan fasilitas sekolah.

Selanjutnya adalah grafik persentase siswa yang enggan pergi ke sekolah dalam kurun waktu tahun 1971 hingga 1990.



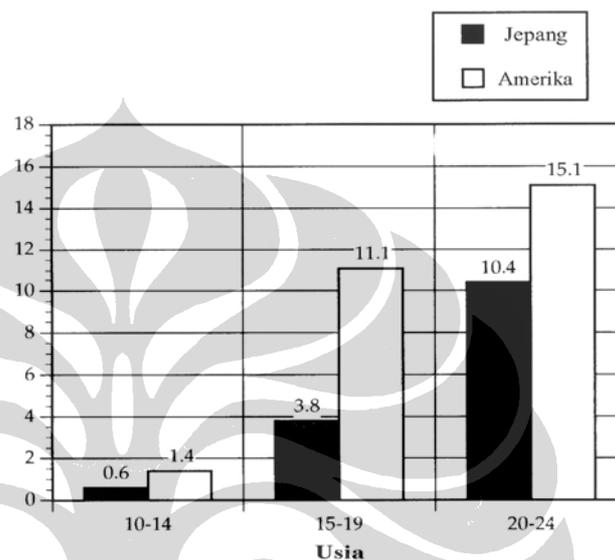
Gambar 3.5 Grafik persentase siswa yang enggan pergi ke sekolah per tahun

Sumber: Mombushō Shōtō Chūtō Kyōikukyoku, 1992

Keengganan pergi ke sekolah atau *futōkō* merupakan bentuk penolakan siswa untuk menghadiri proses belajar di sekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik karena tidak tertarik dengan pelajaran atau menghindari kontak karena takut dengan siswa lain. Bentuk penolakan ini dapat berlangsung selama satu-dua hari, atau dalam kasus ekstrim dapat berlangsung hingga berbulan-bulan.

Melalui grafik di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1971 hingga 1990 terjadi perubahan signifikan pada absensi siswa baik pada jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Kasus *futōkō* pada tingkat SMP jauh lebih banyak dibandingkan dengan tingkat SD, meskipun keduanya sama-sama menunjukkan peningkatan. Persentase kasus *futōkō* mencapai angka paling tinggi pada tahun 1990, yakni melebihi 0,7% untuk jenjang SMP dan hampir mencapai 0,1% pada jenjang SD dari total jumlah seluruh siswa sekolah Jepang.

Bagan terakhir pada bagian ini menunjukkan grafik persentase tindak bunuh diri berdasarkan usia di negara Jepang dan Amerika.



Gambar 3.6 Grafik persentase tindak bunuh diri berdasarkan usia per 100.000 jiwa
Sumber: Mombushō Shōtō Chūtō Kyōikukyoku, 1992

Grafik di atas menunjukkan persentase perbandingan tindak bunuh diri atau *jisatsu* di Jepang dan Amerika. Kasus bunuh diri di Jepang yang dilakukan individu dalam kelompok usia sekolah ditunjukkan dengan persentase jiwa 0,6% untuk kelompok usia 10-14 tahun dan 3,8% untuk usia 15-19 tahun per 100.000 jiwa. Dengan kata lain, di Jepang terdapat 600 individu antara usia 10 hingga 14 tahun dan 3800 individu antara usia 15 hingga 19 tahun yang melakukan tindak bunuh diri pada sekitar tahun 1992. Meskipun relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunuh diri di Amerika, namun jumlah tersebut tetap menjadi perhatian khusus oleh masyarakat. Penyebab tindak bunuh diri beragam, namun

untuk individu yang tergolong dalam usia sekolah, dikhawatirkan permasalahan di lingkungan sekolah menjadi faktor utama pemicu.

Tingginya berbagai permasalahan siswa yang telah ditunjukkan pada grafik-grafik di atas menjadi perbincangan penting oleh berbagai pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung oleh pendidikan. Masyarakat beranggapan bahwa ketatnya pendidikan menjadi penyebab utama peningkatan permasalahan siswa. Berbagai permasalahan siswa dikatakan sebagai akibat dari keresahan dalam menghadapi tuntutan pendidikan oleh siswa yang tidak dapat mengikuti tempo pelajaran. Pada kurun waktu ini pula mulai dikenal luas istilah *jukenjigoku* (受験地獄) yang berarti neraka ujian untuk menunjukkan tingginya tingkat stress siswa dalam menghadapi berbagai ujian, khususnya ujian masuk universitas.

Ujian akademik menjadi salah satu unsur terpenting dalam pendidikan Jepang. Berbagai ujian yang diterapkan pada masing-masing jenjang pendidikan merupakan usaha untuk meratifikasi kemampuan siswa Jepang, juga sebagai alat seleksi dalam meritokrasi pendidikan Jepang, sehingga siswa yang terbaik akan mendapatkan posisi terbaik dalam masyarakat. Dalam kegiatan belajar di kelas sehari-hari, guru sering mengadakan test kecil untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Pada tingkat SMP, terdapat *teikishiken* (定期試験), yakni ujian reguler yang diadakan sebanyak 2 hingga 6 kali dalam satu periode tahun ajaran. Ujian ini ditujukan untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi ujian masuk SMA yang akan diikuti siswa yang berkeinginan melanjutkan pendidikan. Ujian masuk SMA tersebut terdiri dari ujian tingkat nasional maupun perfektur,

sesuai dengan predikat SMA yang ingin dipilih, baik sekolah umum dan sekolah kejuruan. Pelajaran yang diujikan sesuai dengan kurikulum SMP yang telah disusun pemerintah, berupa soal-soal pelajaran utama yakni bahasa Jepang, matematika, ilmu sosial, dan ilmu alam. Bagi siswa lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, terdapat ujian berupa *daigakunyūshi* (大学入試) yakni ujian masuk universitas. Ujian ini ditujukan untuk menyeleksi calon siswa sesuai minat pendidikan yang ingin mereka tekuni dan diadakan pada universitas yang ingin mereka pilih. Seperti halnya ujian masuk SMA, ujian ini menguji kemampuan siswa dalam menghadapi soal-soal pelajaran akademik utama. Selain itu, terdapat pula soal pilihan seperti bahasa Inggris, Prancis, atau Jerman, dan pelajaran lainnya berupa pelajaran moral, politik, ekonomi, sejarah Jepang, sejarah dunia, geografi, dan ilmu sosial kontemporer.

Berbagai ujian tersebut menuntut siswa untuk berusaha memberikan hasil yang terbaik demi masa depan mereka. Motivasi belajar menjadi tinggi sehingga berpengaruh pada pola belajar siswa Jepang, yang selanjutnya menentukan keberhasilan sumber daya manusia Jepang. Namun, pada perkembangannya keadaan ini diyakini sebagai faktor utama meningkatnya berbagai permasalahan oleh siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran. Pendidikan seperti ini oleh masyarakat umum dikenal dengan istilah *tsumekomu kyōiku* (詰め込み教育) yang berarti pendidikan yang berat atau padat. Untuk itu, pemerintah berupaya mencari cara untuk mengurangi tekanan yang diakibatkan oleh pendidikan tersebut.

Pada tahun 1989, pemerintah kembali mengajukan pengurangan jam pelajaran sekolah dan diberlakukan mulai tahun 1992. Sekolah Jepang yang semula melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dari hari Senin sampai Sabtu, setelah adanya kebijakan ini, maka hari Sabtu minggu kedua menjadi diliburkan, dan pada tahun 1995 hari Sabtu keempat juga turut diliburkan. Pelajaran sosial dan alam pada kelas satu dan dua Sekolah Dasar dihapus dan diganti dengan “pelajaran kehidupan” yang menekankan pada pengenalan kehidupan untuk siswa dengan cara yang dipercaya lebih efektif, yakni mencoba untuk terjun langsung ke lingkungan alam dan masyarakat. Melalui revisi ini, pemerintah memperkenalkan perspektif “kemampuan” yang baru, bahwa kemampuan yang paling dasar dibutuhkan seseorang adalah kemampuan untuk terus bertahan dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

KURIKULUM *YUTORI KYOUIKU*

3.1 Reformasi Pendidikan Abad Ke-21

Pendidikan Jepang pasca Perang Dunia II dilandaskan pada prinsip modernisasi dengan pemikiran bahwa seiring peningkatan kualitas pendidikan, perekonomian bangsa juga akan turut bangkit. Dengan adanya hal tersebut, maka pendidikan Jepang menerapkan kesamaan kesempatan dalam pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan diwujudkan melalui *kakuitsubyōdō* atau standarisasi pendidikan. Melalui standarisasi tersebut, semua siswa memiliki kemampuan yang sama tinggi untuk berkontribusi penuh dalam usaha memajukan bangsa, khususnya perekonomian. Strategi ini berhasil sehingga dalam kurun waktu beberapa dasawarsa setelah mengalami kehancuran akibat kekalahan perang, Jepang telah diakui sebagai salah satu negara industri termaju di dunia.

Seiring dengan waktu, terjadi perubahan dalam kondisi pendidikan dan masyarakat Jepang yang patut menjadi perhatian masyarakat luas dan juga pemerintah. Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang melalui Kementerian Pendidikan¹⁶, terdapat tiga keadaan utama yang menaungi keadaan sosial pendidikan Jepang pada saat menanti abad ke-21.

Berikut adalah kondisi masyarakat Jepang yang melatarbelakangi Reformasi Pendidikan Abad Ke-21.

1. Dengan tingginya angka urbanisasi dan *shōshika* (少子化), yakni rendahnya persentasi kelahiran anak dalam masyarakat Jepang, dan juga terjadinya degradasi pendidikan pada lingkup keluarga dan komunitas lokal, maka pendidikan Jepang menghadapi berbagai isu yang serius. Berbagai isu tersebut ditunjukkan melalui tingginya tingkat permasalahan siswa dalam sekolah seperti penindasan, keengganan menghadiri sekolah, dan kekerasan yang dilakukan oleh kalangan muda, juga munculnya kecenderungan individualitas dalam masyarakat.
2. Melalui standardisasi pendidikan, terjadi eksploitasi pendidikan berlebihan akibat egalitarisme yang terlalu jauh sehingga melupakan kepentingan pribadi siswa. Sistem pendidikan Jepang yang sedang dijalankan tidak mendukung kebebasan dan hak siswa, juga tidak mampu memaksimalkan perkembangan kepribadian siswa.
3. Seiring dengan kemajuan zaman, terjadi perubahan dramatis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi sosial-ekonomi, dan juga

¹⁶ *Educational Reform* (<http://www.mext.go.jp>)

komputerisasi. Sistem pendidikan Jepang yang sedang dijalankan dirasa tidak akan mampu mengikuti perubahan masyarakat dunia.

Melalui penjelasan di atas, maka seperti telah terjadi pada kurun waktu sebelumnya, pemerintah Jepang bermaksud untuk merevisi pendidikan sehingga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Jepang pada saat itu. Pada tahun 1996 ketika Komite Pusat Untuk Pendidikan yang ke-15 ditanyakan oleh Kementerian Pendidikan Jepang mengenai model pendidikan yang tepat untuk menghadapi abad ke-21 yang akan segera tiba, mereka mengusung topik *ikiruchikara* (生きる力) yang mengandung makna kemampuan untuk bertahan hidup dan *shōgaigakushū* (生涯学習) atau *lifelong learning*, yakni proses belajar seumur hidup. Mereka menyatakan bahwa pendidikan sekolah yang tengah berlangsung tidak memelopori kreativitas dan pengembangan kepribadian siswa yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan sosial. Melalui kurikulum yang mengusung *ikiruchikara* dan *shōgaigakushū*, diharapkan siswa Jepang memiliki keseimbangan dan kesempurnaan intelektual, moral, dan juga fisik yang akan menjadi dasar untuk menghadapi kehidupan dalam masyarakat.

Untuk mencapai kesempurnaan yang telah disebutkan di atas, tiap siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan pribadi dan menggali potensi dirinya semaksimal mungkin. Hal tersebut tentu tidak dapat terwujud apabila terus terjadi keseragaman dalam standardisasi pendidikan, juga dengan tingginya tingkat stress yang dihadapi siswa saat menghadapi tuntutan akademik. Untuk itu

pada tahun 1998 pemerintah Jepang kembali mengusulkan pengurangan jam pelajaran sekolah, kali ini secara drastis.

Pada Januari tahun 2001, Kementerian Jepang mengumumkan model pendidikan untuk abad yang baru sesuai dengan laporan final Komite Pusat Untuk Pendidikan satu bulan sebelumnya. Pada tahun 2002, reformasi pendidikan dengan landasan revisi Garis Besar Panduan Pendidikan tahun 1998 dilaksanakan. Dengan demikian, sebanyak 20% jam pelajaran dan 30% total isi pelajaran dipotong dan semua hari Sabtu menjadi libur sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah Jepang hanya berlangsung selama lima hari aktif, yakni dari hari Senin hingga Jumat.

Berikut adalah rangkuman Reformasi Pendidikan tahun 2002.¹⁷

1. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berbasis “yutori”, isi Garis Besar Haluan Pendidikan dipadatkan dan dalam waktu bersamaan proses pengajaran di sekolah dioptimalisasikan dengan tujuan agar seluruh siswa memiliki penguasaan terhadap kemampuan dasar.
2. Meniadakan standardisasi pendidikan dan memperkenalkan sistem pendidikan baru yang melibatkan masing-masing sekolah dalam menentukan isi pelajaran sebagai upaya mempromosikan keberagaman dalam pendidikan.

¹⁷ Yamanouchi Kenshi dan Hara Kiyoharu, *Gakuryokumondai • Yutori Kyōiku*, (Tōkyo: Nihontosho Center, 2007) hlm 29.

3. Dalam rangka memupuk “*ikiru chikara*” siswa yakni kemampuan dasar untuk menghadapi kehidupan, diperkenalkanlah sistem belajar yang komprehensif yang berdasarkan pada pengalaman.
4. Dalam rangka mengurangi otoritas tunggal oleh Kementerian Pendidikan dan sebagai upaya mendukung otonomi daerah, maka cakupan diskresi guru diperluas.
5. Demi mewujudkan penilaian dari luar terhadap guru sekolah secara komprehensif dan objektif, maka apabila terdapat bentuk ketidakpantasan yang diperbuat oleh staf pengajar terhadap fungsi lain di sekolah, maka dimungkinkan terjadinya rotasi.

Berikut adalah rangkuman perubahan isi Garis Besar Panduan Pendidikan untuk semua jenjang pendidikan.¹⁸

1. Pemilihan isi pendidikan yang teliti dan tepat guna agar sesuai dengan tujuan pendidikan yakni mengembangkan kemampuan dasar individu.
2. Memperkaya pendidikan dengan cara memperluas cakupan studi dengan tujuan mengoptimalkan perkembangan pribadi individu.
3. Memperkaya tiap pelajaran dengan proses belajar yang berbasis pengalaman dan penyelesaian masalah untuk mendukung usaha belajar mandiri.
4. Memberikan waktu untuk studi integratif dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyelesaikan suatu masalah secara independent dan kreatif.

¹⁸ *Formal Education, Elementary and Secondary Education* (<http://www.mext.go.jp>)

5. Mengembangkan pendidikan moral untuk melatih siswa mengerti mengenai etika dan norma dalam masyarakat untuk dapat membedakan yang baik dan buruk.

Dalam mewujudkan kurikulum yang baru, pemerintah menambahkan waktu *sōgōtekinagakushū* (総合的な学習) ke dalam jadwal pelajaran di sekolah. Dalam bahasa Inggris, sesi pelajaran ini disebut sebagai *integrated study*. Dalam bahasa Indonesia istilah tersebut dapat dikatakan sebagai "sesi belajar secara komprehensif". Sesuai asal katanya, sesi belajar ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang luas dan menyeluruh kepada siswa. Pendidikan yang dimaksud adalah untuk mengembangkan kepribadian siswa, baik dalam hal kemandirian, kreativitas, tanggung jawab, dan pengaturan diri melalui berbagai kegiatan kelompok. Pendidikan ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali minat dan kemampuan diri mereka. Melalui pendidikan seperti ini, diharapkan siswa dapat melatih kemampuan analisis menghadapi berbagai persoalan dengan kemampuan mereka sendiri secara kreatif dan inovatif.

Dalam sesi belajar secara komprehensif ini, siswa memperoleh kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dengan praktik langsung, seperti kegiatan langsung di alam dan lingkungan sosial, melakukan observasi lapangan, percobaan, dan juga investigasi. Para siswa juga dilatih untuk dapat memahami keadaan lingkungan di sekitarnya, situasi internasional, informasi umum, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, juga mengenai hal-hal lain yang mereka minati. Meskipun hal-hal tersebut dapat dipelajari sendiri melalui pengalaman

hidup seseorang, namun pemerintah Jepang memutuskan untuk memasukkannya sebagai bagian dari kurikulum yang baru. Jumlah waktu dan jenis kegiatan untuk sesi ini ditentukan sendiri oleh masing-masing sekolah, dengan mempertimbangkan lokasi dan kebutuhan siswa. Namun demikian, secara umum kegiatan-kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan tiap mata pelajaran utama yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Jepang.

Berdasarkan penjelasan mengenai reformasi pendidikan dan perubahan Garis Besar Panduan Pendidikan tahun 1998 di atas, maka selanjutnya akan dibahas mengenai kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam pendidikan dasar Jepang yang mengalami dampak perubahan paling besar.

3.2 Kurikulum Yutori Kyouiku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Jepang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1983, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Definisi tersebut kurang lebih sama di seluruh dunia, termasuk pula untuk kurikulum di Jepang. Dalam kurikulum sekolah Jepang terdapat perangkat mata pelajaran yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Susunan mata pelajaran tersebut berbentuk tetap dan tidak mengalami perubahan berarti sejak pertama dibentuk pasca Perang Dunia II, meskipun Garis Besar Panduan Belajar yang menaunginya terus mengalami perubahan. Perubahan dimaksudkan agar pendidikan selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, perubahan yang

dimaksud dapat berbentuk apa saja, namun seperti yang telah dijelaskan pada subbab pertama bab ini, perubahan tersebut terletak pada revisi Garis Besar Panduan Belajar sekolah Jepang.

Meskipun konsep pendidikan *yutori* telah ada sejak era tahun 1970-an, namun bagi sebagian besar masyarakat Jepang, istilah *yutori kyouiku* mengacu pada model pendidikan sesuai Reformasi Abad Ke-21 yang dicanangkan pemerintah¹⁹. Berangkat dari hal tersebut maka *yutori kyouiku* yang akan dijelaskan selanjutnya pada skripsi ini adalah kurikulum yang didasarkan pada revisi Garis Besar Panduan Belajar tahun 1998. Pada kurikulum yang akan dibahas berikut, perubahan yang terjadi tidak hanya terletak pada pengurangan jumlah jam dan konten pendidikan pada tiap pelajaran, tapi juga meliputi keseluruhan cara belajar di kelas.

Berikut akan dijelaskan kurikulum *yutori kyouiku* Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Jepang, dua jenjang pendidikan dasar Jepang yang mengalami dampak perubahan paling besar.

3.2.1 Kurikulum Yutori Kyouiku Sekolah Dasar Jepang

Sesuai dengan Garis Besar Panduan Belajar yang telah dibentuk sejak tahun 1947, mata pelajaran dalam kurikulum Sekolah Dasar Jepang terbagi menjadi tiga bagian, yakni mata pelajaran utama, pendidikan moral, dan kegiatan khusus. Mata pelajaran utama terdiri dari pelajaran bahasa Jepang, ilmu sosial,

¹⁹ Sesuai dengan liputan media massa Jepang.

matematika, ilmu alam, musik, kesenian, keterampilan rumah tangga, dan olahraga. Pendidikan moral merupakan sebuah pelajaran yang dimaksudkan untuk memupuk nilai-nilai moral siswa, untuk meningkatkan pemahaman tentang baik dan buruk agar mampu bersikap sesuai norma-norma dalam masyarakat. Pada kegiatan khusus, masing-masing sekolah berhak menentukan jenis kegiatan apa yang akan diselenggarakan seperti *undōkai* (運動会) yakni kegiatan olahraga yang melibatkan seluruh tingkatan kelas, kegiatan klub siswa, dan kegiatan-kegiatan lainnya selain pelajaran yang telah disebutkan di atas.

Seiring dengan revisi pendidikan yang dilakukan pemerintah, maka jumlah jam pada tiap mata pelajaran yang telah disebutkan di atas turut mengalami pengurangan. Berikut adalah tabel jumlah jam pelajaran Sekolah Dasar Jepang sesuai dengan revisi Garis Besar Panduan Belajar tahun 1998.

MATA PELAJARAN	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4	KELAS 5	KELAS 6	
Bahasa Jepang	272	280	235	235	180	175	1.377
IPS	—	—	70	85	90	100	345
Matematika	114	155	150	150	150	150	869
IPA	—	—	70	90	95	95	350
Pelajaran Kehidupan	102	105	—	—	—	—	207
Musik	68	70	60	60	50	50	358
Kesenian	68	70	60	60	50	50	358
Keterampilan Rumah Tangga	—	—	—	—	60	55	115
Olahraga	90	90	90	90	90	90	540
Pelajaran Moral	34	35	35	35	35	35	209
Kegiatan khusus	34	35	35	35	35	35	209
Sesi Belajar Secara Komprehensif	—	—	105	105	110	110	430
TOTAL	782	840	910	945	945	945	5.367

Gambar 4.1 Tabel jumlah jam pelajaran SD Jepang pada kurikulum Yutori Kyouiku

Sumber: Kementerian Pendidikan Jepang (2008)

Keterangan:

1. Periode satu jam pelajaran adalah 45 menit.
2. Kegiatan khusus yang dimaksud sesuai dengan Garis Besar Panduan Belajar untuk SD (tidak termasuk kegiatan makan siang bersama). Termasuk di dalamnya kegiatan klub siswa.
3. Sebagai tambahan pengetahuan agama pada pendidikan moral, maka pelajaran agama dapat disubstitusikan dengan pelajaran moral.

Melalui tabel di atas dapat dilihat perincian jumlah jam pada tiap pelajaran sesuai tingkatan kelas pada Sekolah Dasar Jepang. Jumlah total jam pelajaran adalah 5.367 jam. Sesuai keterangan Kementerian Jepang, jumlah tersebut berkurang 418 jam dari kurikulum sebelumnya yang berjumlah 5.785 jam. Pengurangan jam pelajaran tersebut dilakukan secara merata pada seluruh mata pelajaran kecuali pelajaran moral, musik, kesenian, dan kegiatan khusus pada kelas 1 dan 2. Pengurangan jam pelajaran secara drastis tersebut ditandai dengan penonaktifan seluruh hari Sabtu yang semula merupakan hari sekolah. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar di tingkat Sekolah Dasar dilaksanakan lima hari dalam seminggu mulai Senin hingga Jumat.

Secara garis besar, jumlah dan jenis pelajaran pada kurikulum *yutori kyouiku* sama dengan yang telah disusun pada kurikulum yang terdahulu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perubahan yang terjadi terletak pada jumlah jam dan isi pelajaran. Perubahan ini tentunya berakibat pada perubahan cara

pengajaran, yang sesuai dengan namanya, menjadi lebih “santai” dan “leluasa”. Sistem belajar sekolah Jepang selama ini yang menekankan pada penghafalan pelajaran dan sentralisasi guru diharapkan tidak lagi ditemukan pada kurikulum ini. Proses belajar di kelas menekankan pada diskusi antara guru dan siswa, dan biasanya siswa dibagi lagi menjadi kelompok diskusi kecil. Guru yang semula menjadi satu-satunya sumber kebenaran selanjutnya cukup berperan sebagai moderator yang mengatur jalannya diskusi sesuai dengan pelajaran yang telah diajarkan sebelumnya. Dengan demikian, pertanyaan siswa tidak hanya terjawab oleh guru, namun juga dari hasil diskusi yang telah dilalui bersama teman-temannya. Apabila ada seorang siswa yang merasa tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, maka guru akan mengulang pelajaran dan teman-temannya akan turut membantu sehingga semua siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik.

Selanjutnya merupakan ilustrasi proses belajar pada sebuah kelas Sekolah Dasar Jepang²⁰.

Pada pelajaran kehidupan di sebuah kelas tingkat awal Sekolah Dasar, *Sensei* (guru) memulai pelajaran dengan mengingatkan siswa mengenai tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Siswa diminta untuk mencatat berbagai peraturan dan larangan di sebuah taman dekat sekolah. *Sensei* lalu mencatat berbagai peraturan dan larangan yang telah didata siswa di papan tulis. Setelah itu, *Sensei* memulai diskusi dengan sebuah pertanyaan. “Ada sebuah peraturan yang mengatakan ‘Dilarang membuang sampah sembarangan’.

²⁰ Catherin C. Lewis. *Educating Hearts and Minds*.

Memangnya kenapa?”. Tentu dengan cepat siswa saling berbebut untuk menjawab ”Karena nanti menjadi kotor” atau ”Tidak indah”. Selanjutnya *Sensei* bertanya, ”Ada larangan untuk tidak memetik bunga. Kenapa?”. Seorang siswa menjawab ”Karena bunganya akan cepat layu”, sementara siswa yang lain menjawab ”Kalau semua orang memetik bunga, tamannya akan menjadi kosong”. *Sensei* lalu bertanya untuk menguji, ”Kalau begitu, kita boleh memetik daun? Atau mencabut rumput? Tentu tidak menjadi masalah karena jumlahnya jauh lebih banyak dari bunga, bukan?”.

Melalui ilustrasi di atas dapat diketahui tujuan dasar dari pendidikan *yutori kyouiku*, bahwa dengan situasi belajar yang nyaman, maka secara alamiah siswa akan termotivasi untuk mencari tahu lebih banyak mengenai sebuah pelajaran sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi ketegangan siswa.

Pada tahun 2004, Kariya Takehiko melakukan sebuah survei pada empat Sekolah Dasar di Oosaka²¹. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gambaran suasana belajar di dalam kelas khususnya pada pelajaran matematika dan bahasa Jepang. Berikut merupakan poin pertanyaan yang diberikan seputar cara belajar di dalam kelas.

²¹ Yamanouchi Kenshi dan Hara Kiyoharu, *Gakuryokumondai • Yutori Kyōiku*, (Tōkyo: Nihontoshō Center, 2007) hlm 132.

	CARA BELAJAR DI KELAS	Rata-rata	SD I	SD II	SD III	SD IV
Matematika	Menggunakan buku teks dan papan tulis	84,3	84,7	94,7	82,6	77,0
	Melalui pengajaran yang intensif dan test	27,1	23,8	19,7	33,3	47,5
	Pemberian tugas atau pekerjaan rumah	30,6	31,9	43,4	30,4	55,7
	Berlatih memecahkan soal	18,7	13,9	19,7	21,7	37,7
	Melalui presentasi	36,2	40,3	60,5	50,7	32,8
Bahasa Jepang	Menggunakan buku teks dan papan tulis	83,1	67,0	82,5	78,3	75,4
	Melalui pengajaran yang intensif dan test	35,5	5,6	15,8	44,9	60,7
	Pemberian tugas atau pekerjaan rumah	34,2	37,5	28,9	27,5	42,6
	Berlatih memecahkan soal	29,6	23,6	19,7	27,5	42,6
	Melalui presentasi	43,8	52,8	72,4	53,6	34,4

Gambar 4.2 Tabel cara belajar di kelas Sekolah Dasar Jepang
Sumber: Gakuryokumondai • Yutori Kyouiku (2007)

Dari hasil survei terhadap empat Sekolah Menengah Pertama, terdapat persentase jawaban yang kurang lebih sama baik untuk pelajaran matematika maupun bahasa Jepang. Pada pelajaran matematika, keempat sekolah rata-rata menjawab bahwa penggunaan buku teks dengan media papan tulis paling banyak digunakan, yakni sebanyak 84,3%. Selanjutnya, pengajaran secara intensif dengan test secara rutin dilakukan sebanyak 27,1%, lalu pemberian tugas sebanyak 30,6%, berlatih memecahkan persoalan sebanyak 18,7%, dan presentasi sebanyak 36,2%. Untuk pelajaran bahasa Jepang, jawaban rata-rata keempat sekolah adalah sebanyak 83,1% untuk penggunaan teks dengan media papan tulis, 35,5% untuk pengajaran secara intensif dengan test secara rutin, 34,2% untuk tugas, 29,6% untuk berlatih memecahkan persoalan, dan 43,8% untuk presentasi.

Sebagai tambahan pertanyaan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula pertanyaan yang lebih ditujukan untuk mengetahui kebiasaan siswa dalam kelas.

KEBIASAAN DI KELAS	Rata-rata	SD I	SD II	SD III	SD IV
Selalu membuat catatan pelajaran	84,6	90,3	81,6	78,7	84,6
Mengemukakan pendapat atau bertanya dengan mengangkat tangan	37,6	38,9	67,1	39,1	18,0
Bertanya saat ada pelajaran yang tidak dimengerti	34,4	30,5	61,8	37,6	31,2
Membagi kelas menjadi kelompok belajar lebih kecil	33,0	33,3	38,2	43,5	31,1

Tabel 4.3 Tabel pola kebiasaan di kelas Sekolah Dasar Jepang
Sumber: Gakuryokumondai • Yutori Kyouiku (2007)

Dari hasil survei di atas, rata-rata 84,6% dari siswa keempat sekolah terbiasa membuat catatan pelajaran, 37,6% selalu mengangkat tangan saat hendak bicara, 34,4% bertanya saat ada pelajaran yang tidak dimengerti, dan 33,0% melaksanakan pengorganisasian kelompok belajar di dalam kelas.

Dari hasil survei yang dilakukan pada empat sekolah, dapat diperoleh gambaran mengenai proses belajar pada sebuah Sekolah Dasar. Pada jenjang pendidikan ini, proses belajar di kelas paling banyak menggunakan metode pengajaran dengan buku dan papan tulis, yakni saat guru menerangkan, siswa membuat catatan mengenai bagian-bagian yang dirasa penting. Meskipun demikian, guru tetap memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan bertanya. Pemberian tugas dan test kecil tetap dirasa perlu. Guru juga membagi kelas menjadi kelompok belajar lebih kecil untuk memperlancar diskusi.

Dengan demikian, secara keseluruhan pada jenjang pendidikan ini metode analisis untuk memecahkan suatu masalah dengan pemikiran sendiri belum terlalu ditekankan.

3.2.2 Kurikulum Yutori Kyouiku Sekolah Menengah Pertama Jepang

Seperti halnya Sekolah Dasar, pada Sekolah Menengah Pertama Jepang juga terdapat kurikulum yang mengatur perangkat mata pelajaran dan jumlah jamnya. Sesuai dengan Garis Besar Panduan Belajar yang telah dibentuk sejak tahun 1947, mata pelajaran dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama Jepang terbagi menjadi empat bagian, yakni mata pelajaran utama, mata pelajaran pilihan, pendidikan moral, dan kegiatan khusus. Seperti pada Sekolah Dasar, mata pelajaran utama terdiri dari pelajaran bahasa Jepang, ilmu sosial, matematika, ilmu alam, musik, kesenian, keterampilan rumah tangga, dan olahraga. Pendidikan moral dan kegiatan khusus juga memiliki bentuk yang kurang lebih sama. Satu hal yang membedakan, pada Sekolah Menengah Pertama ada yang dinamakan mata pelajaran pilihan. Jenis mata pelajaran ini berbeda-beda pada setiap sekolah, dengan mempertimbangkan lokasi sekolah dan kebutuhan siswa untuk menunjang kehidupan dewasanya.

Berikut adalah tabel jumlah jam pelajaran Sekolah Menengah Pertama Jepang sesuai dengan revisi Garis Besar Panduan Belajar tahun 1998, atau lebih dikenal dengan kurikulum *yutori kyouiku* SMP Jepang.

PELAJARAN	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	
Bahasa Jepang	140	105	105	350
IPS	105	105	85	295
Matematika	105	105	105	315
IPA	105	105	80	290
Musik	45	35	35	115
Kesenian	45	35	35	115
Olahraga	90	90	90	270
Keterampilan Rumah Tangga	70	70	35	175
Bahasa Asing	105	105	105	315
Pelajaran Moral	35	35	35	105
Kegiatan Khusus	35	35	35	105
Pelajaran Pilihan	0-30	50-85	105-165	155-280
Sesi Belajar Secara Komprehensif	70-100	70-105	70-130	210-335
TOTAL	980	980	980	2.940

Gambar 4.4 Jumlah jam pelajaran SMP Jepang pada kurikulum Yutori Kyouiku

Sumber: Kementerian Pendidikan Jepang (2008)

Keterangan:

1. Periode satu jam pelajaran adalah 50 menit.
2. Kegiatan khusus yang dimaksud sesuai dengan Garis Besar Panduan Belajar SMP (tidak termasuk kegiatan makan siang bersama). Termasuk di dalamnya kegiatan klub siswa.
3. Dalam hal jumlah jam yang ditentukan untuk pelajaran pilihan, jumlah jam untuk kegiatan khusus dapat disubstitusikan dengan pelajaran pilihan.

Berbeda dengan Sekolah Dasar yang memiliki beberapa mata pelajaran khusus yang hanya terdapat pada tingkatan kelas tertentu, pada Sekolah Menengah Pertama semua tingkatan kelas mendapatkan jenis pelajaran yang sama, namun hanya dibedakan oleh jumlah jam pelajaran. Melalui tabel yang tertera pada halaman sebelumnya dapat dilihat perincian jumlah jam pada tiap pelajaran

sesuai tingkatan kelas pada Sekolah Menengah Pertama Jepang. Secara keseluruhan, jumlah total jam pelajaran adalah 2.940 jam. Sesuai keterangan Kementerian Jepang jumlah tersebut berkurang 210 jam dari kurikulum sebelumnya yang berjumlah 3.150 jam. Pengurangan jam pelajaran tersebut dilakukan secara merata pada beberapa mata pelajaran dengan mempertimbangkan keseimbangan bobot antar pelajaran.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama ini dikenal adanya pelajaran pilihan. Siswa memiliki kebebasan untuk memilih pelajaran yang tersedia sesuai keinginannya. Pelajaran tersebut dapat berupa bahasa asing maupun pelajaran lainnya dalam lingkup pertanian, industri, kelautan, perdangan, ataupun keterampilan rumah tangga. Jumlah pelajaran yang dapat dipilih disesuaikan dengan ketentuan batas jam pelajaran yang telah ditentukan untuk masing-masing tingkatan kelas, yakni hingga 30 jam untuk siswa kelas 1, 50 hingga 85 jam untuk siswa kelas 2, dan 105 hingga 165 jam untuk siswa kelas 3. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan ilmu dan mengoptimalkan perkembangan dirinya sesuai dengan bidang yang diminati, juga untuk mengarahkan siswa menentukan pekerjaan impiannya.

Pada kurikulum yang baru ini, pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris yang semula menjadi mata pelajaran pilihan, selanjutnya menjadi mata pelajaran wajib. Pemerintah Jepang juga mengundang *native speaker* atau penutur asli bahasa Inggris khususnya dari Amerika sebagai guru bantu di sekolah-sekolah Jepang. Hal ini sesuai dengan misi Pendidikan Abad Ke-21 yang dicetuskan

pemerintah untuk mendukung usaha mempersiapkan generasi muda menghadapi globalisme, dalam hal ini tentu harus mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik.

Seperti penelitian yang dilakukan pada empat Sekolah Dasar di Oosaka yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Kariya Takehiko juga melakukan sebuah survei dengan mengambil sampel empat Sekolah Menengah Pertama²². Berikut merupakan poin pertanyaan yang diberikan seputar cara belajar di kelas.

	CARA BELAJAR DI KELAS	Rata-rata	SMP I	SMP II	SMP III	SMP IV
Matematika	Menggunakan buku teks dan papan tulis	83,4	88,0	93,3	68,9	81,1
	Melalui pengajaran yang intensif dan test	18,5	4,8	14,0	3,2	45,6
	Pemberian tugas atau pekerjaan rumah	18,9	6,4	82,6	2,6	8,1
	Berlatih memecahkan soal	11,8	8,8	20,8	10,5	11,1
	Melalui presentasi	8,7	2,4	24,2	3,7	13,3
Bahasa Jepang	Menggunakan buku teks dan papan tulis	83,4	52,8	94,4	81,1	81,1
	Melalui pengajaran yang intensif dan test	22,1	12,0	6,2	45,6	47,8
	Pemberian tugas atau pekerjaan rumah	24,6	0,8	34,8	8,1	66,7
	Berlatih memecahkan soal	26,1	59,2	43,3	11,1	31,1
	Melalui presentasi	22,0	64,8	42,1	13,3	35,6

Gambar 4.5 Tabel cara belajar di kelas Sekolah Menengah Pertama Jepang
Sumber: Gakuryokumondai • Yutori Kyouiku (2007)

Dari hasil survei terhadap empat Sekolah Menengah Pertama, terdapat persentase jawaban yang kurang lebih sama baik untuk pelajaran matematika maupun bahasa Jepang. Pada pelajaran matematika, keempat sekolah rata-rata menjawab bahwa penggunaan buku teks dengan media papan tulis paling banyak digunakan, yakni sebanyak 83,4%. Selanjutnya, pengajaran secara intensif dengan test secara rutin dilakukan sebanyak 18,5%, lalu pemberian tugas sebanyak 18,9%, berlatih memecahkan persoalan sebanyak 11,8%, dan presentasi sebanyak 8,7%.

²² *Ibid.* Hlm 130-131.

Untuk pelajaran bahasa Jepang, jawaban rata-rata keempat sekolah adalah sebanyak 83,4% untuk penggunaan teks dengan media papan tulis, 22,1% untuk pengajaran secara intensif dengan test secara rutin, 24,6% untuk tugas, 26,1% untuk berlatih memecahkan persoalan, dan 22,0% untuk presentasi.

Sebagai tambahan pertanyaan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula pertanyaan yang lebih ditujukan untuk masing-masing individu yang merepresentasikan cara belajar siswa baik ketika berada di dalam maupun luar sekolah.

POLA BELAJAR SISWA	Rata-rata	SD I	SD II	SD III	SD IV
Mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan dengan sebaik-baiknya	64,4	58,4	77,5	67,2	61,1
Mempelajari kembali pelajaran yang telah diajarkan	14,0	14,4	23,0	13,7	15,5
Bersungguh-sungguh mempelajari pelajaran yang tidak disukai	43,4	36,8	60,1	50,3	43,3
Belajar dengan sungguh-sungguh ketika akan diadakan test	46,2	44,0	49,4	48,8	41,1

Tabel 4.6 Tabel pola kebiasaan di kelas Sekolah Menengah Pertama Jepang
Sumber: Gakuryokumondai • Yutori Kyouiku (2007)

Dari pertanyaan yang telah disebutkan sebelumnya, siswa pada keempat sekolah rata-rata menjawab bahwa mereka paling bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang mereka terima, yakni sebanyak 64,4%. Mereka juga bersungguh-sungguh saat belajar untuk menghadapi test yang akan diadakan (46,2%) dan saat mempelajari pelajaran yang tidak mereka senangi (43,4%). Meskipun demikian, hanya sebanyak 14,0% mengaku bahwa mereka mengulang kembali dan mencoba memecahkan berbagai persoalan pada pelajaran yang telah mereka terima sebelumnya.

Melalui penjelasan di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara cara belajar di Sekolah Menengah Pertama dengan jenjang sebelumnya. Pada Sekolah Dasar, proses belajar di kelas lebih berorientasi pada diskusi antara guru dan murid untuk mendapatkan jawaban dari suatu masalah dan tidak terlalu terfokus pada usaha analisis pribadi oleh siswa. Sedangkan pada Sekolah Menengah Pertama, siswa diharapkan sudah mulai belajar menganalisis suatu masalah dengan kemampuan sendiri.

Sebagai catatan, pada jenjang ini pula tingkat permasalahan siswa paling tinggi dibandingkan dengan Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Atas. Total siswa yang menolak untuk menghadiri sekolah mencapai 138.722 pada tahun 2000, yakni 1,23% dari jumlah total keseluruhan siswa. Jumlah kasus *ijime* atau penindasan terhadap seorang siswa oleh temannya mencapai 34.595 kasus pada tahun 1999, meskipun angka tersebut turun hingga angka 31.278 kasus pada tahun 2002. Jumlah tersebut belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan dan juga jenis permasalahan lainnya seperti perusakan inventaris sekolah hingga aksi bunuh diri²³. Untuk itu diperlukan sebuah usaha untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang telah disebutkan di atas, dan kurikulum *yutori kyouiku* diharapkan mampu menjadi salah satu solusi.

²³ *Inequality and Japanese Education: Urgent Choices* (<http://www.zmag.org>)

3.3 Dampak *Yutori Kyouiku*

Seiring dengan kemajuan perekonomian Jepang yang didukung oleh majunya pendidikan bangsa, para ahli pendidikan mencoba melakukan berbagai penelitian untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal sesuai pelajaran yang telah mereka peroleh di sekolah. Hasil penelitian tersebut menjadi indikator tingkat pendidikan nasional, sehingga tinggi-rendah nilai yang mereka peroleh akan menjadi penentu persepsi masyarakat terhadap kondisi pendidikan bangsa.

Suatu penelitian dapat meliputi skala kecil seperti pada tingkat sekolah, hingga cakupan lebih besar pada skala nasional maupun internasional. Secara sederhana, penelitian mengukur kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal sesuai pelajaran yang telah dipelajari di sekolah. Pada tingkat lebih mendalam, penelitian tidak hanya digunakan untuk mengetahui tingkat kecakapan siswa dalam mengerjakan soal pelajaran sekolah, namun juga mengukur kemampuan mereka dalam menganalisis, menghadapi, dan memecahkan suatu masalah berdasarkan ilmu yang telah mereka peroleh di sekolah.

3.3.1 Penurunan Kemampuan Akademik Siswa

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kebijakan kurikulum *yutori kyouiku* dan gambaran pelaksanaannya pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Jepang. Bersamaan dengan dimulainya pelaksanaan kurikulum tersebut, berbagai organisasi maupun perorangan melakukan penelitian

berkaitan dengan kualitas pendidikan siswa. Dari berbagai penelitian tersebut, secara mengejutkan terungkap bahwa kemampuan siswa Jepang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada perkembangan selanjutnya, penurunan tersebut dikaitkan dengan keberadaan kurikulum *yutori kyouiku*.

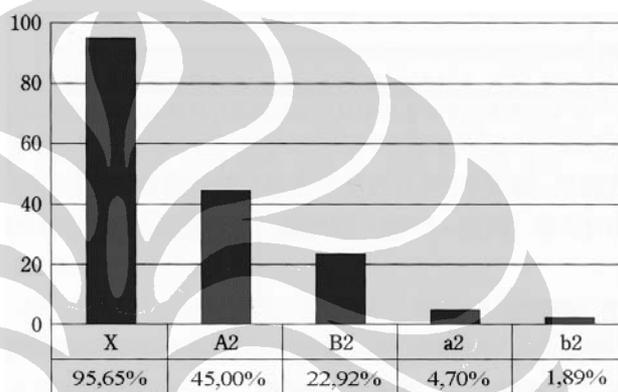
Berikut merupakan dua contoh penelitian pada skala nasional dan internasional yang mengindikasikan penurunan tingkat pendidikan siswa pada awal abad yang baru.

3.3.1.1 Ujian Kemampuan Matematika Dasar Mahasiswa Jepang

Pada tahun 1998, Tose Nobuyuki dan Nishimura Kazuo melakukan penelitian terhadap mahasiswa tingkat 1 pada sejumlah universitas swasta Jepang. Mereka mencoba mengukur kemampuan para mahasiswa dalam matematika dasar. Pertanyaan yang diberikan merupakan soal matematika tingkat Sekolah Dasar yang diperkirakan merupakan persoalan yang dapat diselesaikan dengan mudah oleh mahasiswa. Dari hasil penelitian, secara mengejutkan ditunjukkan bahwa hanya 1 dari 5 siswa yang dapat mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik.

Pada tahun 1998 mereka melanjutkan penelitian pada mahasiswa tingkat 1 beberapa universitas negeri *top* dengan predikat bagus. Di luar dugaan, hasil penelitian juga menunjukkan rendahnya pencapaian siswa. Bahkan pada sebuah universitas, dari ketentuan nilai penuh sebanyak 25 poin, para mahasiswa rata-rata hanya mampu menjawab benar sebanyak 8 poin.

Melihat hasil di atas, para peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian pada skala lebih besar dengan melakukan survei yang sama pada sebuah universitas di Cina. Selanjutnya, mereka membandingkan hasilnya dengan mahasiswa universitas di Jepang. Berikut merupakan grafik persentase perolehan nilai matematika mahasiswa tingkat 1 di beberapa universitas Jepang dan Cina.



Gambar 4.7 Grafik persentase perolehan nilai matematika dasar mahasiswa tingkat 1 universitas Jepang dan Cina

Sumber: Pusat Penelitian Perekonomian Asia Timur (2000)

Grafik di atas menunjukkan perolehan nilai yang berbeda-beda untuk masing-masing universitas. Pada grafik tersebut, X menunjukkan sebuah universitas di Cina, A2 dan B2 merupakan universitas negeri di Jepang, dan a2 dan b2 merupakan universitas swasta di Jepang. Dari perolehan nilai, dapat dilihat bahwa persentase paling tinggi diperoleh oleh universitas di Cina (96,65%). Selanjutnya secara bertahap persentase jumlah nilai menurun untuk Universitas Negeri A Jepang (45,00%), Universitas Negeri B (22,92%), Universitas Swasta A (4,70%), dan Universitas Swasta B (1,89%). Pada universitas di Cina, hanya terdapat 2 siswa yang mendapat perolehan nilai masing-masing 23 dan 24 poin,

selebihnya mendapat nilai penuh sebanyak 25 poin²⁴. Hasil tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh mahasiswa universitas di Jepang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa meskipun mahasiswa universitas negeri memperoleh persentase nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa universitas swasta, namun keduanya sama-sama menunjukkan pencapaian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan universitas di Cina. Hal ini tentu mengejutkan, mengingat keadaan bahwa mahasiswa universitas negeri sebelumnya harus melalui ujian seleksi masuk universitas yang ketat untuk dapat masuk perguruan tinggi favorit pilihan mereka. Ujian yang ketat tersebut tentu menyertakan soal matematika yang tidak hanya setingkat Sekolah Dasar, namun hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Dengan demikian terungkap suatu kondisi yang mengkhawatirkan, yakni ketidakmampuan peserta didik tingkat atas Jepang (mahasiswa) dalam menghadapi persoalan matematika dasar yang sudah sewajarnya mampu mereka kuasai. Hal ini segera mendapat perhatian khusus sehubungan dengan adanya indikasi penurunan kualitas pendidikan Jepang.

3.3.1.2 Program Penilaian Siswa Tingkat Internasional

Pada akhir tahun 2003, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi mengadakan penelitian untuk mengetahui tingkat pendidikan negara-negara di dunia. Di bawah Programme for International Student Assessment (PISA) atau

²⁴ *Ibid.* Hlm 39-56.

Program Penilaian Siswa Tingkat Internasional, OECD mengadakan survei terhadap siswa dari 30 negara anggota OECD dan 11 negara lainnya untuk menilai kemampuan mereka dalam bidang matematika, ilmu pengetahuan umum, membaca, dan memecahkan masalah. Survei tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah pertama kalinya diadakan pada tahun 2000. Pada tahun 2004, OECD mengumumkan hasil awal survei. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selang 3 tahun sejak diadakannya survei yang pertama, peringkat siswa Jepang secara keseluruhan mengalami penurunan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai peringkat siswa Jepang pada masing-masing kategori penilaian²⁵.

Pada pelajaran matematika, peringkat siswa Jepang menurun dari posisi pertama menjadi keenam. Meskipun demikian, Jepang tetap memiliki persentase siswa yang menduduki peringkat atas paling banyak dibandingkan dengan negara lain, yakni sebesar 8,2% atau dua kali lebih besar dari rata-rata OECD sebesar 4,0%. Di sisi lain, persentase siswa yang berada di urutan bawah pada pelajaran matematika sebesar 4,7%. Meskipun angka tersebut lebih rendah dari rata-rata OECD sebesar 8,3%, namun tetap lebih tinggi dibandingkan dengan negara Finlandia (1,5%), Kanada (2,4%), Korea Selatan (2,5%), and Belanda (2,6%).

Pada kemampuan pemahaman membaca peringkat siswa Jepang juga menurun, yakni dari posisi delapan menjadi keempat belas. Persentase jumlah siswa yang menduduki peringkat terbawah meningkat dari 2,7% pada survei pertama menjadi 7,4% pada survei kedua. Angka tersebut melampaui persentase

²⁵ *Inequality and Japanese Education: Urgent choices* (<http://www.zmag.org>)

rata-rata peringkat terbawah OECD sebesar 6,7%. Sebagai pembanding kontras, persentase jumlah siswa di peringkat teratas tetap pada kisaran angka yang sama, yakni 9,9% pada tahun 2000 dan 9,7% pada tahun 2003. Angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata OECD sebesar 8,3%.

Pada ilmu pengetahuan umum, 10% dari siswa Jepang dengan peringkat teratas mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, sedangkan nilai siswa pada peringkat terbawah justru menurun. Sebagai tambahan, dalam hal motivasi belajar, secara umum siswa Jepang menduduki posisi bawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata siswa kelas 1 SMA Jepang hanya menghabiskan waktu 6,5 jam per minggu di luar jam sekolah untuk belajar. Angka tersebut sudah termasuk waktu yang dihabiskan untuk les tambahan. Hal ini lebih rendah dari rata-rata negara anggota OECD lain yang menghabiskan waktu sebanyak 8,9 jam.

Dengan demikian, meskipun secara umum Jepang tetap memiliki siswa-siswa yang menduduki peringkat teratas pada pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan umum, namun persentase siswa yang menduduki peringkat terbawah juga meningkat. Hal ini menyebabkan kekhawatiran karena hasil evaluasi PISA tidak hanya diperuntukkan mendapatkan peringkat nilai siswa saja, namun juga untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keahliannya untuk menganalisis, menjelaskan, dan mengkomunikasikannya secara efektif dalam menghadapi berbagai situasi.

3.3.2 Kritik Masyarakat

Pada subbab sebelumnya dijelaskan mengenai dua penelitian yang mencoba mengukur kemampuan siswa, yakni ujian kemampuan matematika dasar oleh mahasiswa Jepang dan penelitian oleh OECD. Penelitian tersebut dilaksanakan bersamaan dengan diadakannya reformasi pendidikan baru yang mengusung kurikulum *yutori kyouiku*. Hal ini tentunya segera menjadi perhatian publik dan tidak sampai satu tahun sejak mulai diberlakukan, kurikulum *yutori kyouiku* telah menuai kritik. Masyarakat memandang bahwa kurikulum yang baru tersebut justru memperparah keadaan pendidikan yang sedang menurun. Pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pendidikan seperti guru, orang tua, dan bahkan siswa sendiri merasa bahwa dengan pendidikan yang terlalu santai, siswa justru menjadi malas dan enggan belajar. Media massa Jepang mempercepat perluasan kritik tersebut sehingga banyak pihak khususnya Kementerian Pendidikan Jepang merasa perlu mengadakan suatu evaluasi yang lebih mendalam.

Untuk mencari tahu mengenai pendapat masyarakat Jepang mengenai kurikulum *yutori kyouiku*, penulis menggunakan media internet. Penulis mencari secara *random* dengan memasukkan kata kunci *yutori kyouiku* ke dalam *search engine* internet. Berikut merupakan beberapa contoh kutipan yang diambil dari berbagai situs web berita dan *blog*.

Pada salah satu halaman *World Press*, sebuah situs berita berbahasa Inggris, terdapat sebuah liputan perjalanan wartawan Hidemine Takahashi dari

majalah *Bungei Shunju* pada tahun 2002. Takahashi meliput beberapa Sekolah Dasar di Tōkyo untuk mencari tahu pendapat siswa mengenai kurikulum *yutori kyouiku* yang baru diterapkan. Berikut merupakan ringkasan hasil wawancaranya dengan beberapa siswa Sekolah Dasar di daerah Kunitachi.

”Inoue, seorang siswa kelas 6, menyatakan bahwa yang menjadi masalah bukanlah pada kenyataan kurikulum *yutori kyouiku* itu baik atau buruk. Hanya saja, perubahan (kurikulum) itu telah mengacaukan seluruh sekolah.

Dengan nada yang sama, Yamada, siswa kelas 6 yang lain, mengeluhkan bahwa pelajaran di sekolah kini terkesan *darui* atau tumpul. Ketika ditanyakan lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa guru di kelasnya terus menerus mengulang pelajaran yang sama yang sebetulnya telah dipelajari. Sebagai catatan, Yamada dan teman-temannya menjalani kurikulum yang baru ketika naik ke kelas 6. Ia menyatakan bahwa pelajaran-pelajarannya kini hanya mengulang apa yang telah ia pelajari di kelas 5.

Melalui berbagai evaluasi, Kementerian Pendidikan Jepang menyimpulkan bahwa pelajaran di kelas akan terasa membosankan apabila tidak dimengerti, oleh sebab itu isi pelajaran harus dikurangi agar semua siswa dapat mengerti pada tingkatan yang sama. Namun, para siswa menyatakan bahwa sebetulnya hampir seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dan hanya sedikit yang tertinggal. Yamada menambahkan, ”Bukannya mereka tidak bisa, tapi hanya kurang berusaha”.

Sepertinya dengan adanya kurikulum yang baru, para siswa justru merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya, khususnya dari segi jadwal pelajaran. Dalam seminggu kini ada 3 hari yang terdapat 6 sesi pelajaran. Semula, hanya hari Jumat yang terdapat sesi pelajaran sebanyak itu.”

Selanjutnya pada sebuah situs *web* lain bernama *52campus* yang berisi panduan pendidikan bagi calon mahasiswa, terdapat sebuah forum yang membahas sebuah topik berjudul ”Yutori kyouikutte, seikō shitano?” (Apakah yutori kyouiku berhasil?). Berikut merupakan kutipan komentar beberapa pengunjung situs tersebut pada akhir tahun 2007 hingga awal tahun 2008 .

「私はゆとり教育は失敗していると思います。... 土曜日が休みになった分他の日に時間をプラスして詰め込まなければいけなくなり、授業内容を圧縮して削ってしまったために、学習内容も実に貧相なものになってはいませんか？」

Terjemahan:

”Menurut saya yutori kyouiku gagal. ... Meskipun hari Sabtu menjadi libur, namun pada hari lainnya jam pelajaran jadi bertambah karena pelajaran dipadatkan. Kalau untuk itu harus terjadi pengurangan isi pelajaran, bukankah isi pendidikan lantas menjadi sangat sedikit?”

「私はゆとり教育の中で育ってきました。ゆとり教育は失敗に終わっただけだと思います。... 学校によって結構違うのですが、ある学校は余った時間（総合など）で英語の授業をしたりするんですけど、違う学校ではお楽しみ会をやって教師が生徒のの機嫌をとっているだけに思います。」

Terjemahan:

”Saya tumbuh di tengah kurikulum yutori kyouiku. Menurut saya yutori kyouiku berakhir gagal. ... Berbeda di tiap sekolah tentang mana yang terbaik, ada sekolah yang apabila ada sisa waktu (seperti pada pelajaran komprehensif) diisi dengan pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan pada sekolah yang lain guru hanya menyuruh siswa melakukan kegiatan yang mereka sukai.”

Berikutnya, sebuah forum lain membahas topik berjudul ”Yutori kyouiku wa, osoidesuka?” (Apakah pendidikan yutori kyouiku lambat?). Berikut adalah komentar salah seorang pengunjung.

「遅いですよ。ゆとり教育というやつで学力低下がきわまりないです。教科書は絵ばかりで薄いし。低学年だと理科・社会もなく、生活という教科で総合学習になっています。... 日本の公立学校の教育レベルは低いです。」

Terjemahan:

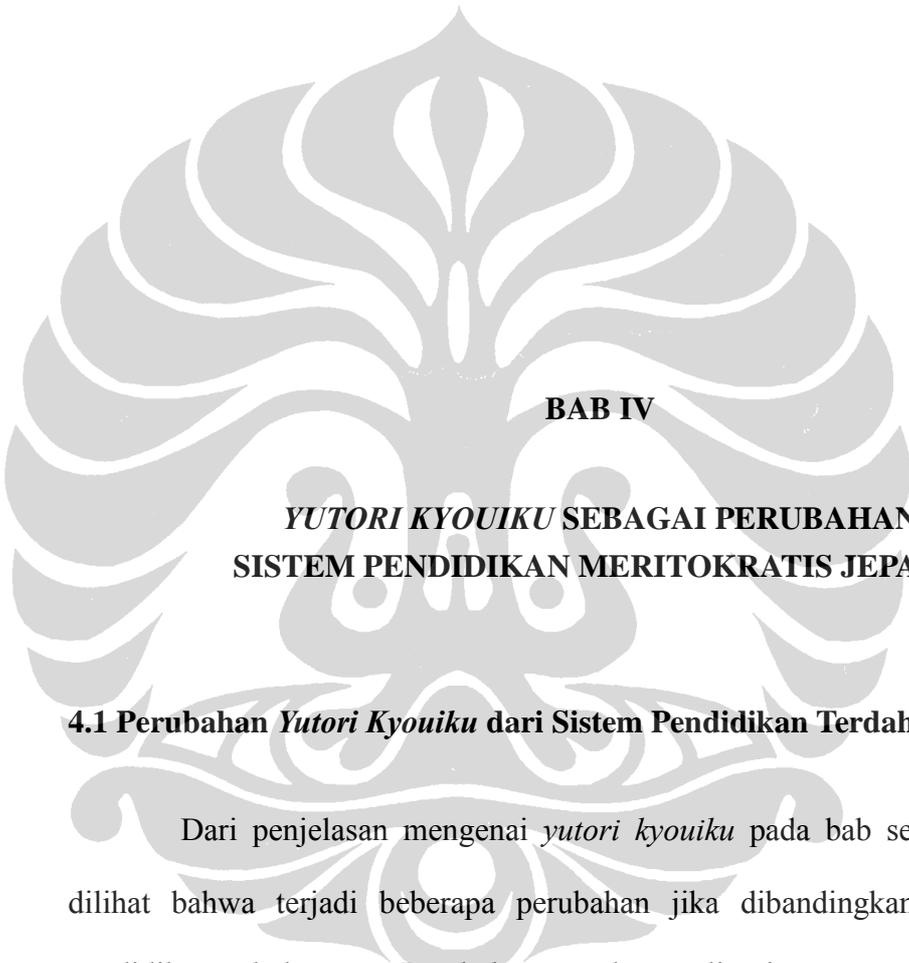
”Iya, lambat. Dengan adanya yutori kyouiku, kemampuan jadi menurun secara drastis. Buku teks pelajaran tipis dan hanya berisi gambar. Pada tingkat awal Sekolah Dasar tidak ada pelajaran ilmu alam dan sosial, hanya ada pelajaran kehidupan yang mengajarkan pendidikan komprehensif. ... Kualitas sekolah negeri Jepang rendah.”

Selanjutnya, selain berbagai contoh kritik masyarakat yang diambil dari buku dan situs internet, dalam suatu kesempatan penulis berkesempatan mewancarai seorang *Sensei* asal Jepang yang sedang berada di Indonesia untuk memberikan kuliah mengenai wanita dan kebudayaan Jepang. *Sensei* tersebut memiliki tiga anak laki-laki dengan usia yang berdekatan, sehingga ketika kurikulum *yutori kyouiku* diberlakukan ketiganya menjalani kurikulum yang baru masing-masing pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Ketika penulis bertanya mengenai *yutori kyouiku*, *Sensei* menjelaskan bahwa kurikulum tersebut memang betul tidak diterima di masyarakat Jepang. Ia menjelaskan proses belajar yang dijalani oleh

anak-anaknya, bahwa mereka merasa tidak mendapat pelajaran berarti di sekolah. Guru hanya memberikan sebuah topik lalu menyuruh siswa berkumpul dalam kelompok kecil dan berdiskusi mengenai topik itu.

Pada kesempatan lain, penulis bertanya pada seorang mahasiswa Jepang yang sedang menjalani kuliah di Indonesia. Mahasiswa tersebut mengalami kurikulum *yutori kyouiku* ketika berada di Sekolah Menengah Atas. Ketika ditanyakan pendapat mengenai kurikulum tersebut, ia hanya menjawab "Tidak baik", lalu mengatakan bahwa kurikulum tersebut merupakan kegagalan pemerintah Jepang dan masyarakat tidak menerima.

Beragam pendapat yang diambil dari berbagai sumber di atas menunjukkan luasnya kritik terhadap *yutori kyouiku* dalam masyarakat Jepang. Meskipun ada beberapa pihak yang setuju dengan kurikulum tersebut, namun berbagai buku dan media massa Jepang secara umum menampilkan tema "yutori kyouiku" dengan nada negatif.



BAB IV

***YUTORI KYOUIKU* SEBAGAI PERUBAHAN SISTEM PENDIDIKAN MERITOKRATIS JEPANG**

4.1 Perubahan *Yutori Kyouiku* dari Sistem Pendidikan Terdahulu

Dari penjelasan mengenai *yutori kyouiku* pada bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa terjadi beberapa perubahan jika dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Perubahan tersebut meliputi pengurangan pada jumlah jam pelajaran dan isi pendidikan pada kurikulum sekolah, yang kemudian berimplikasi pada perubahan cara pengajaran oleh guru di dalam kelas. Perubahan tersebut selanjutnya berpengaruh pada pola belajar siswa yang secara langsung berakibat pada pencapaian nilai. Berikut merupakan penjelasan perubahan-perubahan utama yang terjadi dengan adanya *yutori kyouiku*.

1. Pengurangan Jumlah Jam Pelajaran dan Isi Pendidikan

Melalui *yutori kyouiku*, pemerintah Jepang memperkenalkan konsep *ikiru chikara* yakni kemampuan untuk bertahan hidup, *sōgōtekinagakushū* yakni pelajaran komprehensif, dan *shōgaigakushū* yakni proses belajar seumur hidup yang diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan sekolah Jepang. Pada tingkat Sekolah Dasar, jumlah total jam pelajaran berkurang dari 5.785 jam menjadi 5.367 jam dalam satu tahun ajaran. Pengurangan jam pelajaran tersebut dilakukan secara merata pada seluruh mata pelajaran kecuali pelajaran moral, musik, kesenian, dan kegiatan khusus pada kelas 1 dan 2. Pengurangan jam pelajaran tersebut cukup drastis dan ditandai dengan penonaktifan seluruh hari Sabtu yang semula merupakan hari sekolah. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar di tingkat Sekolah Dasar dilaksanakan lima hari dalam seminggu mulai Senin hingga Jumat.

Jumlah jam pelajaran tersebut, meskipun disertai dengan pengurangan pada konten pelajaran, namun tetap tidak bisa memfasilitasi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk penyampaian materi. Akibatnya pada beberapa sekolah seperti pada Sekolah Dasar di daerah Kunitachi, Tōkyo yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, waktu belajar dalam sehari justru bertambah. Meski hari Sabtu menjadi libur, namun dalam rangka mengejar materi yang harus disampaikan oleh guru kepada siswa, maka periode jam pelajaran dalam sehari justru bertambah. Hal ini mengakibatkan jam sekolah yang lebih panjang dan menjadi permasalahan bagi siswa yang pada sore harinya harus mengikuti *juku* atau les tambahan sepulang sekolah. Sama halnya dengan Sekolah Dasar, perubahan tersebut juga terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Secara keseluruhan, jumlah total

jam pelajaran berkurang dari 3.150 jam menjadi 2.940 jam. Meski tidak sedrastis pengurangan pada Sekolah Dasar, namun pengurangan tersebut tetap berpengaruh pada jumlah jam sekolah dalam sehari. Seperti halnya Sekolah Dasar, hari Sabtu yang semula merupakan hari sekolah juga menjadi libur.

2. Perubahan Cara Pengajaran

Dari penjelasan pada pembahasan bab sebelumnya, terjadi perubahan cara pengajaran oleh guru kepada siswa pada proses belajar di dalam kelas. Melalui berbagai evaluasi, Kementerian Pendidikan Jepang menyimpulkan bahwa pelajaran di kelas akan terasa membosankan apabila tidak dimengerti, oleh sebab itu isi pelajaran harus dikurangi agar semua siswa dapat mengerti pada tingkatan yang sama. Namun dari hasil kutipan wawancara yang dilakukan oleh wartawan majalah *Bungei Shunju* yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, para siswa Sekolah Dasar di daerah Kunitachi, Tōkyo menyatakan bahwa sebetulnya hampir seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dan hanya sedikit yang tertinggal. Pelajaran di kelas dikatakan terlalu mengulang-ulang sehingga siswa merasa bahwa mereka tidak mendapatkan tambahan ilmu yang berarti. Pelajaran di kelas juga dirasa lebih lambat karena guru mengajar dengan tempo yang lebih pelan untuk mengimbangi seluruh siswa. Proses belajar di kelas menggunakan metode diskusi melalui kelompok kecil, namun yang terjadi justru siswa tidak mendapatkan tambahan ilmu yang berarti karena hanya mengandalkan informasi dari teman-teman sebaya, sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator.

3. Perubahan Cara Belajar dan Pencapaian Nilai Siswa

Sistem *yutori kyouiku* dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan tujuan meringankan beban belajar siswa melalui penciptaan lingkungan belajar yang nyaman. Dengan demikian, diharapkan berbagai permasalahan siswa akan dapat ditanggulangi dan siswa mampu mengoptimalkan perkembangan dirinya. Di luar dugaan, kurikulum tersebut menuai kritik dari masyarakat. Penurunan nilai akademik siswa dan melebarnya jurang pemisah antara siswa dengan nilai tinggi dan nilai rendah menjadi isu utama. Namun demikian, belum ada bukti nyata yang dapat dikatakan sebagai penyebab utama menurunnya kemampuan siswa tersebut.

Banyak pihak yang telah mencoba menganalisis situasi pendidikan tersebut menyatakan adanya keterkaitan antara penurunan nilai dengan keadaan sosial masyarakat Jepang. Seperti dikatakan oleh Tomoaki Nomi, seorang profesor bidang politik dari *Southeast Missouri State University*, adanya kesenjangan dalam perolehan nilai siswa membawa dampak pada situasi sosial-ekonomi masyarakat Jepang. Dengan adanya kurikulum *yutori kyouiku*, orang tua dan siswa merasa kebutuhan akan les tambahan di luar jam pelajaran sekolah meningkat. Hal ini dibarengi dengan meningkatnya minat terhadap sekolah swasta. Pada tahun 1975, sebanyak 26% siswa lulusan Sekolah Menengah Atas swasta berhasil masuk Universitas Tōkyo melalui ujian masuk universitas negeri. Pada tahun 1993, jumlah tersebut bertambah menjadi 50%. Meningkatnya minat dan kesempatan memasuki universitas favorit tersebut justru menjadi perhatian khusus karena tidak semua orang tua mampu membiayai anak mereka untuk mengikuti les tambahan dan mendaftar ke sekolah swasta yang bergengsi.

Hal itu diperkuat dengan adanya dugaan bahwa masyarakat Jepang mengalami pelebaran jurang pemisah dalam hal pendapatan ekonomi. Dengan demikian, muncul kekhawatiran bahwa hanya siswa-siswa dari keluarga mampu yang bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas, sehingga hanya mereka pula yang akan mendapatkan pekerjaan dan status sosial yang lebih baik di kemudian hari. Bila hal ini berlanjut, tentu akan menjadi sebuah permasalahan sosial yang pelik yang membutuhkan penanganan segera oleh pemerintah dan masyarakat sendiri.

Dari penjelasan di atas, faktor-sosial ekonomi menjadi isu utama yang menyebabkan peningkatan diskriminasi kemampuan siswa. Berbeda dengan pendapat tersebut, Atsuko Arai dan takao Terano dalam bab berjudul *Yutori Is Considered Harmful: Agent-Based Analysis for Education Policy in Japan* pada buku *Gaming, Simulations, and Society*, memberikan penyebab yang berbeda. Menggunakan simulasi agen terhadap analisis kebijakan pendidikan terhadap kemampuan akademik siswa, mereka menyatakan bahwa perbedaan tingkat perolehan nilai siswa bukanlah disebabkan oleh kemampuan akademik ataupun investasi dalam pendidikan (seperti mengikuti les tambahan ataupun memasuki sekolah yang bagus). Namun, perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh berubahnya peraturan yang menuntut pencapaian nilai yang baik, dalam hal ini berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Mereka menyarankan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya menargetkan pada peningkatan motivasi belajar siswa. Melalui motivasi belajar yang tinggi, berbagai keterbatasan akan dapat dilalui. Dengan demikian, pemerintah seharusnya memfokuskan pada motivasi belajar siswa karena bagaimanapun tingkat pencapaian akademik ditentukan oleh sistem

pendidikan dan berbagai kebijakan yang menyertainya.

Selanjutnya, *shōshika* atau penurunan angka kelahiran anak merupakan faktor lain yang dianggap mempengaruhi pola belajar siswa. Pada tahun 1999 pemerintah Jepang mengumumkan bahwa rasio kelahiran di Jepang hanya sebesar 1,36 anak per ibu, dan pada tahun 2005 angka tersebut menurun hingga ke angka 1,289. Angka tersebut jauh lebih rendah dari standar tingkat kelahiran anak sebesar 2,08 yang diharapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk menunjang kestabilan jumlah populasi di negara-negara maju²⁶. Fenomena ini menyebabkan penurunan persaingan pada ujian masuk sekolah, baik untuk SMP, SMA, maupun universitas. Bahkan, kini mulai terjadi kecenderungan pihak sekolah atau universitas membebaskan calon siswa dari ujian masuk demi memenuhi target kuota. Hal ini tentunya berpengaruh pada pola belajar siswa yang menyadari adanya kesempatan yang lebih besar untuk lanjut ke jenjang sekolah berikutnya tanpa perlu melakukan persiapan belajar yang terlalu berat.

4.2 *Yutori Kyouiku* dalam Sistem Pendidikan Meritokratis Jepang

4.2.1 *Yutori Kyouiku* Sebagai Bentuk Pendidikan Liberal

Sistem pendidikan yang memegang prinsip *yutori kyouiku* dapat dilihat melalui perspektif liberalisme pendidikan. Seperti yang dikemukakan oleh John

²⁶ *Shōshika* (www.everyting2.com)

Dewey (1953)²⁷, seorang ahli pendidikan, dilihat dari sudut pandang liberalis tujuan utama pendidikan adalah untuk mempromosikan pengoptimalisasian potensi diri individu, dan tidak secara langsung bertujuan untuk mendukung kemajuan masyarakat. Dewey mengkritik pendidikan yang terlalu berorientasi pada menghafal, dengan argumentasi bahwa pendidikan yang demikian tidak mendukung proses perkembangan kreativitas individu. Dengan demikian, perlu adanya perubahan sistem pendidikan menuju arah yang lebih progresif. Dewey menyatakan bahwa individu seharusnya belajar melalui pengalaman, sehingga ilmu yang mereka dapatkan adalah melalui praktik langsung dengan kemauan sendiri dan bukan didasarkan oleh perintah untuk belajar. Dengan demikian, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, namun juga dapat mengasah kemampuan, keterampilan, kebiasaan, dan pribadi diri yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai ragam permasalahan dalam kehidupan sosial. Melalui hal tersebut, individu mampu mengembangkan kemampuan sekaligus motivasi diri untuk berpikir secara kritis mengenai lingkungan sekitar mereka.

Dengan demikian penjelasan tersebut dapat digunakan untuk mengkaji sistem pendidikan *yutori kyouiku* yang diterapkan pemerintah untuk seluruh jenjang pendidikan sekolah. Pendidikan Jepang selama kurun waktu sesudah Perang Dunia II dianggap terlalu berorientasi pada menghafal dalam membekali generasi muda memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengejar industrialisasi. Pendidikan tersebut dikatakan sebagai akibat dari egalitarisme yang terlalu berlebih melalui adanya standarisasi pendidikan dan tuntutan

²⁷ *Society: Themes and Persective*

pencapaian nilai yang tinggi. Akibat dari sistem tersebut, muncul berbagai permasalahan siswa dan membawa pemerintah Jepang untuk menyusun sebuah sistem pendidikan yang baru. Sesuai dengan konsep dasar Reformasi Pendidikan Abad Ke-21 yang dicanangkan pemerintah, pendidikan harus berdasarkan *child-centered* yang berorientasi pada siswa, dan bukan *society-centered* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian dapat dicapai suatu pemahaman bahwa sistem pendidikan *yutori kyouiku* merupakan bentuk dari liberalisme dalam sistem pendidikan modern Jepang.

Sistem pendidikan *yutori kyouiku* dapat dilihat sebagai bentuk pendidikan liberal Jepang melalui adanya progresivisme dalam proses belajar mengajar di kelas. Meski demikian, sistem pendidikan ini tidak seluruhnya mengadaptasi konsep liberalisme pendidikan. Dalam praktiknya, sistem ini tetap menggunakan ujian sebagai pengukur kemampuan siswa dalam proses seleksi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa melalui kurikulum *yutori kyouiku*, meritokrasi tetap terlaksana sebagai bentuk sistem pendidikan modern Jepang. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, meritokrasi merupakan sebuah sistem sosial yang memberikan penghargaan dan posisi sosial kepada seseorang berdasarkan kemampuan dan prestasinya, bukan pada faktor askriptif seperti kelas sosial, etnisitas, maupun jenis kelamin. Melalui meritokrasi, setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan status sosial sesuai dengan hasil prestasi yang diraihnya. Dalam sistem pendidikan Jepang modern, hasil prestasi tersebut diraih melalui pencapaian nilai yang baik dalam berbagai ujian. Keberhasilan dalam ujian merupakan jaminan memperoleh pendidikan

lanjutan yang baik, dan selanjutnya membantu dalam perolehan pekerjaan yang juga baik. Sebuah perusahaan besar yang menjanjikan akan merekrut seseorang dengan latar belakang pendidikan yang terbaik. Contohnya, jika seseorang adalah lulusan sebuah Perguruan Tinggi Negeri prestis seperti Universitas Tōkyo, maka kesempatan yang ia peroleh dalam mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan tentunya lebih besar dibandingkan seseorang yang tidak kuliah sama sekali. Perolehan pekerjaan tersebut menentukan status seseorang dalam masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kualitas pendidikan merupakan hal yang mutlak diperhatikan.

Namun demikian, muncul sebuah wacana dalam masyarakat Jepang berbentuk kritik terhadap *yutori kyouiku*. Dengan kritik tersebut dikatakan bahwa melalui keberadaan *yutori kyouiku* terjadi kecenderungan penurunan kemampuan akademik siswa Jepang. Meski telah ada berbagai penelitian yang berusaha mencari tahu mengenai penyebab penurunan tersebut, baik dari faktor sosial-ekonomi masyarakat maupun perubahan pola belajar siswa, namun pada kenyataannya keadaan tersebut dapat dilihat sebagai perubahan dalam pelaksanaan meritokrasi pendidikan Jepang.

4.2.2 *Yutori Kyouiku* Sebagai Perubahan Sistem Pendidikan Meritokratis Jepang

Melalui berbagai penelitian yang mengukur tingkat kemampuan matematika dasar mahasiswa Jepang dan penelitian oleh OECD seperti telah

dijelaskan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kemampuan akademik siswa mengalami penurunan. Keadaan tersebut menyebabkan adanya dugaan keterkaitan penurunan kemampuan tersebut dengan revisi pendidikan yang telah dilakukan pemerintah sejak kurun waktu tahun 1970-an. Pada pembahasan bab sebelumnya dijelaskan bahwa sejak 30 tahun silam pemerintah mulai mengurangi konten pendidikan secara bertahap demi menciptakan suasana belajar-mengajar di sekolah yang lebih nyaman untuk siswa. Pengurangan tersebut memuncak pada awal abad yang baru dengan dicetuskannya Reformasi Pendidikan Abad Ke-21 yang sekaligus menandai perubahan karakteristik pendidikan Jepang. Dengan adanya pendidikan yang lebih menekankan pada perkembangan pribadi siswa, maka melalui kurikulum *yutori kyouiku* masing-masing siswa memperoleh kesempatan untuk belajar sesuai minatnya. Hal ini langsung disambut dengan pemahaman bahwa tidak perlu lagi ada tekanan bagi siswa untuk menguasai semua pelajaran dengan baik, karena dengan memberi kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya, maka dengan sendirinya kemampuan tersebut akan meningkat.

Melalui pemahaman baru di atas, maka sistem belajar-mengajar di kelas mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti diungkapkan Ken Terawaki dalam buku *Saraba Yutori Kyouiku*, perubahan pendidikan tersebut berjalan dari masa "minna onaji" (semua sama) menuju masa "minna sore zore" (semua sendiri-sendiri). Dengan kata lain, seluruh siswa yang sebelumnya memiliki kemampuan yang sama rata, dengan adanya kurikulum yang baru menjadi berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan adanya

perbedaan perolehan nilai akademik yang menonjol antara siswa yang tetap mempertahankan nilai yang tinggi, dengan siswa yang memperoleh nilai rendah atau bahkan merosot tajam. Hal ini berarti menghilangkan standarisasi pendidikan yang telah ada sejak awal dibentuknya sistem pendidikan Jepang modern, sekaligus menandai adanya perubahan sistem pendidikan.

Pada tahun 2005, siswa Sekolah Dasar yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama swasta dibandingkan negeri mencapai 7,0%. Jumlah tersebut naik dari 5,8% pada tahun 2000. Di Tōkyo, jumlah tersebut bahkan mencapai 25,6%²⁸. Melihat tingginya minat terhadap sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri menimbulkan tanda tanya. Hal ini tentu berkaitan dengan keadaan sekolah swasta yang tentunya membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan sekolah negeri. Tentunya terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan untuk memilih, namun salah satu yang utama adalah pandangan orang tua siswa terhadap kualitas sekolah tersebut. Hal tersebut mengingat kondisi bahwa sekolah anak, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, merupakan tanggung jawab penuh orang tua.

Pada tahun 2006, Pusat Penelitian Pendidikan Universitas Kobe melakukan sebuah penelitian terhadap orang tua yang memiliki anak yang akan memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama. Dari penelitian ini dapat diketahui cara pandang orang tua siswa terhadap *yutori kyouiku* yang berpengaruh pada pengambilan keputusan orang tua dalam memilih sekolah untuk anak mereka.

²⁸ www.mext.go.jp

Penelitian ini menggunakan metode angket secara *random sampling* terhadap 477 orang tua siswa dari sembilan sekolah di Tōkyo. Menggunakan asas penilaian komprehensif Levin (2002), penelitian ini membagi pertanyaan menjadi empat kategori, yakni kebebasan memilih, keadilan, efisiensi, dan kemasyarakatan ²⁹.

Kebebasan memilih dimaksudkan sebagai kemudahan akses informasi yang didapat orang tua dan siswa terhadap sekolah yang ingin dipilih. Keadilan, dimaksudkan untuk mempertanyakan kondisi pendidikan dengan melihat faktor ekonomi dan sosial masyarakat dengan adanya *yutori kyouiku*. Efisiensi merupakan keefektifan kebijakan baru yang muncul sebagai dampak *yutori kyouiku*. Sedangkan kemasyarakatan ditujukan untuk mempertanyakan posisi *yutori kyouiku* dalam membimbing siswa menghadapi kehidupan bermasyarakat. Keempat kategori ini selanjutnya akan menjadi panduan untuk mengetahui pendapat orang tua terhadap *yutori kyouiku*. Untuk lebih jelas, berikut adalah beberapa contoh pertanyaan dari angket yang diberikan.

Kebebasan Memilih

1. Dengan adanya *yutori kyouiku*, tiap sekolah memiliki pendidikan komprehensif dengan kelebihan masing-masing. Hal ini menyebabkan kebingungan karena dibarengi dengan banyaknya pilihan sekolah.
2. Pada saat ingin melanjutkan sekolah, terdapat kemudahan mencari informasi mengenai sekolah tersebut.
3. Pada saat anak ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah yang ia sukai, maka cara komunikasi menjadi hal serius.

Efisiensi

1. Akibat revisi pendidikan tahun 2002, tingkat pencapaian (nilai) siswa secara keseluruhan mengalami penurunan.

²⁹ *Ibid.* Hlm 172-177

2. Penerapan sistem 5 hari sekolah berarti memperbesar beban waktu terhadap siswa.
3. Penerapan sistem 5 hari sekolah berarti mempertinggi biaya sekolah.

Keadilan

1. Adanya kekhawatiran terhadap kualitas pendidikan dengan adanya *yutori kyouiku* mengakibatkan peningkatan minat terhadap SMP swasta.
2. Penerapan *yutori kyouiku* berarti memperlebar jurang pemisah antara sekolah negeri dengan swasta (tingkat ekonomi orang tua siswa).
3. Penerapan *yutori kyouiku* berarti memperlebar jurang pemisah tingkat kemampuan antara siswa yang mengikuti les dengan yang tidak.

Kemasyarakatan

1. Adanya variasi pendidikan komprehensif tiap sekolah menghalangi pentingnya usaha menjadikan sekolah sebagai sarana pengkaderisan siswa menjadi warga masyarakat yang baik.
2. Dasar pemikiran Garis Besar Panduan Belajar adalah lebih dari sekedar mencukupi kebutuhan tumbuh kembang agar mampu menjadi warga masyarakat yang baik.
3. Untuk mendukung usaha penciptaan warga masyarakat yang baik maka usaha bantuan belajar seperti les dan pengajaran bantuan lainnya dirasa perlu.

Melalui berbagai pertanyaan yang terbagi dalam empat kategori di atas, para peneliti mendapatkan persentase jawaban yang menunjukkan arah pola pikir orang tua terhadap kurikulum *yutori kyouiku*. Menggunakan skala 3 sampai 24, ditentukan bahwa angka 3 menunjukkan pandangan paling negatif sedangkan angka 24 menunjukkan pandangan paling positif. Dari hasil penelitian tersebut, jawaban rata-rata untuk pertanyaan mengenai “kebebasan memilih” adalah 12,485 poin. Selanjutnya, jawaban rata-rata untuk pertanyaan mengenai “efisiensi” sebanyak 10,073 poin, untuk pertanyaan mengenai “keadilan” sebanyak 8,080

poin, dan kemasyarakatan sebanyak 12,439 poin. Apabila kembali melihat skala yang telah ditentukan, maka nilai tengahnya (median) adalah pada kisaran angka 13 dan 14. Dengan demikian, melalui jawaban rata-rata yang berkisar di bawah angka median maka diperoleh kesimpulan bahwa pandangan orang tua pada empat Sekolah Dasar di Tōkyo mengenai kurikulum *yutori kyouiku* cenderung negatif.

Dari penjelasan di atas dapat diperoleh gambaran pandangan orang tua siswa terhadap kurikulum *yutori kyouiku*. Dengan adanya pandangan yang cenderung negatif, kepercayaan orang tua terhadap kualitas pendidikan sekolah menjadi berkurang. Sekolah negeri yang berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan mengadaptasi penuh kurikulum yang baru dipandang tidak mampu memfasilitasi siswa dengan baik. Pandangan seperti ini menjadi salah satu pertimbangan orang tua siswa beralih kepada sekolah swasta yang dipercaya memiliki program pendidikan yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh kondisi bahwa meskipun sekolah swasta turut mengadaptasi ketentuan Garis Besar Panduan Belajar yang baru, namun mereka memiliki wewenang lebih besar untuk menentukan sendiri jalannya proses pendidikan di sekolah.

Selanjutnya, terdapat sebuah survei yang dilakukan pemerintah pada tahun 2002 mengenai tingkat partisipan *juku*. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 39% siswa Sekolah Dasar dan 75% siswa Sekolah Menengah Pertama mengikuti *juku* atau les tambahan di luar sekolah untuk memperdalam pemahaman pelajaran. Jumlah tersebut naik masing-masing 12% dan 38%

dibandingkan dengan hasil survei pemerintah pada tahun 1976. Hal ini menjadi perhatian khusus karena pada masa tersebut, pendidikan Jepang terkenal dengan ketatnya persaingan antar siswa dan adanya *jukenjikoku* atau neraka ujian. Les tambahan dianggap sebagai salah satu kebutuhan utama penentu keberhasilan siswa karena melalui persiapan yang matang melalui les, siswa akan lebih mampu menghadapi tuntutan pendidikan. Dengan demikian, merupakan sebuah keadaan yang aneh bahwa dengan adanya pengurangan jam pelajaran dan isi pendidikan melalui kurikulum *yutori kyouiku*, tingkat ketergantungan siswa terhadap les tambahan di luar sekolah justru meningkat. Dengan melihat kembali hasil penelitian terhadap cara pandang orang tua siswa, pemahaman mengenai hal tersebut dapat dicapai. Yakni dengan adanya pandangan yang cenderung negatif terhadap kurikulum *yutori kyouiku*, orang tua meragukan kualitas pendidikan sekolah sehingga diperlukan upaya lain agar siswa dapat tetap memperoleh ilmu dengan baik dan mampu meningkatkan kemampuan akademiknya.

Dengan adanya indikasi penurunan kemampuan akibat *yutori kyouiku*, muncul keresahan dalam masyarakat bahwa sistem pendidikan yang ada tidak lagi mampu memfasilitasi kebutuhan siswa dalam memperoleh ilmu. Apabila hal tersebut berlanjut, maka hanya sedikit orang yang benar-benar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mencapai status tertentu dalam masyarakat. Hal ini menjadi sebuah permasalahan karena hingga saat sistem ini diterapkan, masyarakat Jepang tetap menganut prinsip *gakurekishakai* sebagai bentuk masyarakat meritokratis. Dengan demikian, adanya sistem pendidikan *yutori kyouiku* menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan meritokratis

Jepang. Perubahan ini menjadi indikasi terjadinya perubahan bentuk dari masyarakat modern menuju masyarakat postmodern, yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

4.3 *Yutori Kyouiku* dan Postmodernitas Pendidikan

Pada pembahasan sebelumnya telah diutarakan mengenai teori modernisme oleh Talcott Parsons. Selanjutnya, berbagai perubahan dalam masyarakat modern membawa pada pendekatan teori baru yang dikenal sebagai teori postmodern. Ide postmodernisme pertama mencuat pada tahun 1930-an di wilayah Amerika Latin oleh Federico de Onis yang menggunakannya untuk menjelaskan perubahan masyarakat modern dari modernisme menuju ke arah postmodernisme. Sekitar sepuluh tahun sesudahnya, ide tersebut baru digunakan oleh para sosiolog Amerika dan Eropa³⁰. Terdapat berbagai pendapat mengenai makna dari postmodernisme tersebut. Para sosiolog dengan pendapat ekstrim seperti Habermas dan Baudrillard menyatakan bahwa masyarakat modern telah mati dan telah digantikan oleh postmodernisme. Sebaliknya, sosiolog seperti Fredric Jameson menyatakan bahwa meski telah terjadi perubahan, namun postmodernisme muncul dan terus berkembang bersama modernisme. Terdapat beberapa keadaan yang menandai postmodernisme, yakni kegagalan modernisasi dalam mempertahankan *progress* perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan tidak lagi menyediakan jawaban untuk seluruh persoalan, meningkatnya

³⁰ Perry Anderson, *Asal-usul Postmodernitas*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm 2.

perdebatan budaya, dan berubahnya institusi sosial³¹.

Dalam buku *Sociology: Themes and Perspective*, terdapat kutipan penjelasan sosiolog Robin Usher dan Richard Edwards yang membahas mengenai implikasi postmodernisme pada pendidikan dalam buku mereka yang berjudul *Postmodernism and Education* (1994). Berkaitan dengan makna postmodernisme, Usher dan Edwards menyatakan sebagai berikut.

“To talk about postmodernity, postmodernism, or the postmodern is not therefore to designate some fixed and systematic ‘thing’. Rather, it is to use a loose umbrella term under whose broad cover can be encompassed at one and the same time a condition, a set of practices, a cultural discourse, an attitude and a mode of analysis”.
(*Sociology; Themes and Perspective*: 728)

Dalam bahasa Indonesia, dapat dinyatakan sebagai berikut.

“Berbicara mengenai postmodernisasi, postmodernisme, atau postmodern, berarti tidak menunjuk pada suatu hal yang telah pasti atau sistematis. Konsep tersebut dapat dipahami dengan menggunakan kiasan ‘sebuah payung yang longgar’ yang dapat meliputi dan menjangkau secara lebar, dan pada saat yang bersamaan merupakan sebuah kondisi, seperangkat tindakan, sebuah pernyataan budaya, sebuah sikap, dan sebuah cara analisis”.

Melalui pernyataan di atas, Usher dan Edwards mengatakan bahwa pada postmodernisme, pendidikan seharusnya mengajarkan berbagai macam hal dan menerima bahwa tidak ada satu jenis pendidikan yang sesuai untuk semua. Mereka menyatakan bahwa pendidikan yang berbeda diperlukan oleh individu

³¹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm 200-203.

yang berbeda pula, termasuk kelompok minoritas yang tidak memiliki andil besar dalam sistem pendidikan. Hal ini juga berarti bahwa tidak ada satu kurikulum yang sempurna yang dapat diterapkan dalam sekolah. Selanjutnya Usher dan Edwards menyatakan bahwa terdapat empat kemungkinan perkembangan sistem pendidikan selanjutnya, yakni kemungkinan bahwa sistem pendidikan modern dapat dilanjutkan, bahwa perspektif konservatif dapat diterapkan kembali dalam sistem pendidikan, atau pendidikan dapat dibentuk sesuai dengan sistem kapitalis. Mereka berhati-hati dengan tidak menyebutkan sebuah pernyataan pasti mengenai bagaimana pendidikan postmodern sebaiknya dijalankan, sehingga dapat melanjutkan dengan kemungkinan yang keempat bahwa pendidikan selanjutnya dapat menerapkan konsep postmodernisme dengan menghargai keberagaman budaya, yakni memperhatikan kebutuhan kelompok yang berbeda-beda. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan untuk membentuk pendidikan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Usher dan Edwards selanjutnya menyatakan bahwa pendidikan yang demikian dapat dibentuk melalui *lifelong learning* atau proses belajar seumur hidup, penghargaan terhadap perbedaan budaya, dan penyediaan pendidikan oleh dan untuk seluruh masyarakat.

Melalui pembahasan di atas dapat dilihat bahwa teori karya Usher dan Edwards tersebut dapat digunakan untuk mengkaji perubahan sistem pendidikan Jepang dengan adanya *yutori kyouiku*. Pendidikan Jepang sejak zaman Meiji hingga sesudah Perang Dunia II menandai pendidikan modern yang ditunjukkan dengan adanya meritokrasi dalam sistem pendidikan. Dengan adanya reformasi

pendidikan yang dilakukan pemerintah Jepang pada akhir tahun 1990-an, terdapat perubahan sistem pendidikan yang diberlakukan pada seluruh jenjang pendidikan sekolah. Perubahan tersebut, seperti telah dijelaskan pada subbab latar belakang, terjadi dari model pendidikan *tsumekomi* atau keras menjadi *yutori* atau leluasa. Model pendidikan *tsumekomi* digunakan dengan tujuan mempersiapkan siswa dalam mendukung industrialisasi negara, sehingga pendidikan cenderung seragam dengan tingkat persaingan yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan konsep meritokrasi yang menentukan bahwa hanya siswa dengan prestasi terbaik yang dapat menduduki posisi sosial terbaik.

Melalui reformasi menuju abad ke-21 tersebut, pemerintah memperkenalkan sebuah sistem pendidikan baru yang dikenal sebagai *yutori kyouiku*. Kurikulum ini memberi tekanan bahwa tidak ada satu pendidikan saja yang sesuai untuk semua siswa, sehingga melalui *integrated study* atau pengajaran secara komprehensif, kurikulum tersebut memberikan kesempatan pada siswa untuk mengoptimalkan perkembangan diri dan mengeksplorasi pendidikan sesuai dengan minat masing-masing. Melalui model pendidikan yang baru tersebut, pemerintah Jepang mempromosikan *lifelong learning* atau budaya belajar seumur hidup pada masyarakat. Dari pembahasan tersebut, sepintas terlihat bahwa terdapat kesesuaian antara teori postmodernisme dengan kondisi sistem pendidikan Jepang dengan adanya kurikulum *yutori kyouiku*. Namun untuk membuktikan hal tersebut, perlu diketahui kelanjutan dari sistem pendidikan *yutori kyouiku* tersebut.

Berbagai pandangan masyarakat akibat adanya penurunan kemampuan akademik siswa memicu kritik terhadap sistem pendidikan *yutori kyouiku* yang diberlakukan pemerintah pada seluruh jenjang sekolah sejak tahun 2003. Kritik tersebut semakin meluas melalui pemberitaan di berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik. Keadaan ini membuat pemerintah merasa perlu mengadakan sebuah evaluasi yang lebih mendalam mengenai kelangsungan kurikulum ini.

Yutori kyouiku dirancang dengan tujuan utama mengurangi ketegangan siswa sekaligus menjadi solusi berbagai permasalahan siswa. Dari hasil pantauan pemerintah, tingkat permasalahan siswa mengalami penurunan meskipun tidak sedrastis kemunculannya pada sekitar tahun 1970 dan 1980-an. Seperti pada tingkat *ijime*, kasus di Sekolah Dasar berkurang dari 9.462 kasus pada tahun 1989 menjadi 5.087 kasus pada tahun 2005. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, angka tersebut berkurang dari 19.383 kasus menjadi 12.794 kasus pada tahun perbandingan yang sama ³².

Selanjutnya, pemerintah mengadakan *zenkokutesuto* yakni ujian kemampuan secara nasional yang diselenggarakan untuk siswa tingkat akhir Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pertanyaan yang diberikan adalah seputar kemampuan dasar seperti membaca, menulis, soal berkaitan dengan huruf kanji, pengetahuan umum, dan matematika. Ujian ini dilaksanakan kembali pada tahun 2007 setelah terakhir diselenggarakan pada tahun 1961. Pada masa itu, jenis soal hanya terdiri dari pilihan ganda dan membutuhkan penyelesaian soal yang cepat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Siswa tidak diharapkan

³² www.mext.go.jp

memberikan solusi kreatif dan hanya menjawab soal berdasarkan dari menghafal semata. Kini, ujian tidak hanya terdiri dari pilihan ganda namun terdapat pula pertanyaan yang membutuhkan jawaban essay. Melalui ujian seperti ini siswa diberi kebebasan untuk menjawab soal dengan cara mereka sendiri sebagai pelajaran pada kehidupan nyata sehari-hari bahwa terdapat banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah³³.

Melalui evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan Jepang, diputuskan bahwa jam pelajaran dan isi pendidikan sekolah akan ditambahkan kembali meskipun tidak sebanyak ketika belum diberlakukan kurikulum *yutori kyouiku*. Jumlah total jam pelajaran untuk Sekolah Dasar adalah 5.645 jam dari yang semula 5.367 jam. Pada Sekolah Menengah Pertama, penambahan jam menjadi 3.045 jam dari total 2.940 jam. Sesi pelajaran komprehensif sebagai bagian dari kurikulum *yutori kyouiku* akan tetap diadakan dan diharapkan akan terus menjadi sarana memupuk kreativitas dan kemandirian siswa. Perubahan kurikulum ini sesuai dengan revisi Garis Besar Panduan Belajar tahun 2008 dan akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2009 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui mengenai kelanjutan sistem *yutori kyouiku* yang telah diterapkan pemerintah pada seluruh sekolah Jepang pada awal tahun 2002. Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa terjadi penambahan

³³ *School tests not a piece of cake for students these days* (<http://www.yomiuri.co.jp>)

kembali jumlah jam pelajaran dan konten pelajaran dalam kurikulum baru yang akan diberlakukan tahun mendatang. Penambahan kembali jumlah jam pelajaran pada kurikulum tersebut diharapkan mampu mengembalikan kredibilitas sekolah Jepang khususnya sekolah negeri sebagai fasilitator dalam mengedukasi generasi muda Jepang. Selanjutnya, melalui perubahan tersebut diharapkan siswa mampu meningkatkan kemampuan diri khususnya dalam hal akademik.

Dalam teori postmodernisasi yang dikemukakan Usher dan Edwards, postmodernisasi dalam pendidikan menerapkan keberagaman dalam sistem pendidikan. Mereka menyatakan bahwa dengan menghargai keberagaman seperti dalam hal budaya, maka pendidikan mampu memperhatikan kebutuhan kelompok yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki kesempatan untuk membentuk pendidikan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Namun seperti juga telah diungkapkan, postmodernisasi pendidikan menurut Usher dan Edwards tidak memiliki suatu bentuk yang pasti. Penjelasan yang mereka berikan berupa prinsip-prinsip yang berlawanan dengan postmodernitas dan kemungkinan-kemungkinan perubahan yang bisa timbul, namun mereka tidak menjelaskan secara detail definisi dan ciri-ciri postmodernitas pendidikan. Dari penjelasan sebelumnya, dapat teori postmodernitas memiliki beberapa kesesuaian dengan sistem pendidikan *yutori kyouiku* yang dicanangkan pemerintah. Adanya pendidikan yang beragam dan tidak lagi seragam untuk seluruh siswa memberi kesempatan pada tiap individu untuk berkembang. Juga terdapat *shōgaigakushū* yakni prinsip proses belajar seumur hidup yang sesuai dengan konsep *life long learning* yang diungkapkan Usher dan Edwards. Namun demikian, ketidakjelasan parameter dan batasan

pembahasan teori ini menyebabkan konsep postmodernitas tidak dapat digunakan untuk membahas fenomena *yutori kyouiku*.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat perbandingan dua teori yakni modernitas dan postmodernitas. Seperti telah diungkapkan, adanya perubahan sistem pendidikan modern dapat mengindikasikan adanya masyarakat postmodernitas. Namun dengan ketidakpastian makna postmodernitas yang diungkapkan *Usher dan Edwards*, *yutori kyouiku* tidak dapat dijelaskan menggunakan teori tersebut. Untuk itu analisis sistem pendidikan *yutori kyouiku* perlu dikembalikan ke kerangka teori awal yang menggunakan teori modernisasi oleh Parsons.

Seperti telah diungkapkan, Parsons menyatakan bahwa dalam sebuah masyarakat yang mengalami proses modernisasi, terdapat sistem tindakan melalui proses interaksi antar individu yang dituangkan dalam konsep A-G-I-L, yakni adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola-pola yang ada dalam masyarakat. Parsons juga menggunakan dikotomi askripsi yang berlawanan dengan prestasi dalam variabel-variabel berpola untuk menjelaskan perubahan sistem pendidikan. Perubahan yang terjadi adalah dengan terbentuknya meritokrasi dalam sistem pendidikan modern. Hal ini juga dilalui oleh masyarakat Jepang dengan adanya sistem pendidikan modern setelah Restorasi Meiji. Menggunakan teori modernisasi oleh Parsons, keberadaan *yutori kyouiku* dapat dilihat sebagai perubahan sistem pendidikan meritokratis Jepang. Dengan adanya *yutori kyouiku*, masyarakat tidak dapat menerima dampak perubahan sistem pendidikan yang begitu drastis. Adanya penurunan nilai yang menandai penurunan kemampuan akademik tidak sesuai dengan prinsip meritokratis yakni

gakurekishakai yang telah ada sejak masa awal modernisasi pendidikan Jepang. Setelah diterapkan dalam masyarakat, konsep dasar pendidikan yang leluasa dilihat tidak dapat berdampingan dengan meritokrasi. Apabila kebijakan *yutori kyouiku* diteruskan, maka akan berdampak pada melemahnya sistem meritokrasi dan dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat Jepang secara menyeluruh. Namun seperti telah diungkapkan sebelumnya, kurikulum sekolah Jepang mengalami perubahan dengan kembali ditambahkan jumlah jam pelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Jepang tetap mendukung meritokrasi dalam sistem pendidikan. Keberadaan *yutori kyouiku* dapat dilihat sebagai perubahan sistem pendidikan meritokratis, namun dengan diubahnya kembali kurikulum pendidikan dengan penambahan kembali jumlah jam pelajaran, hal tersebut menunjukkan bahwa meritokrasi tetap terwujud dalam sistem pendidikan Jepang modern.